

Lampiran
Analisis Framing

Kriteria I : Sebelum peristiwa berlangsung (pemicu konflik)

<i>Frame</i>	<i>Problem Identification</i>	<i>Causal Interpretation</i>	<i>Moral Evaluation</i>	<i>Treatment Recommendation</i>
24 pekerja jalan trans Papua di Nduga tewas dibunuh	Pembunuhan.	kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya.	24 Pekerja jalan trans Papua yang sedang berkerja diduga tewas dibunuh.	Personil gabungan TNI/Polri diterjunkan dan selalu siap melakukan evakuasi para korban dan menangkap para pelaku.
Gereja : Insiden Nduga berawal dari aksi protes warga	Pelimpahan kewenangan.	Sayap militer organisasi Papua merdeka menolak pembangunan.	Polemik mengakibatkan korban yang tewas adalah warga sipil.	Menyerahkan sepenuhnya kepada pihak aparat keamanan.
Ini kesaksian korban dan mantan pekerja proyek di Yall Nduga	Pelanggaran perjanjian.	Kelompok bersenjata OPM	Kontak senjata mengakibatkan sejumlah pekerja terkena tembakan, lemparan batu, dan penganiyaan.	Tidak ada penekanan penyelesaian.

Frame 1 : 24 pekerja jalan trans Papua di Nduga tewas dibunuh

<i>Problem Identification</i>	Tabloidjubi.com mengidentifikasi 24 pekerja PT. Istaka Karya adalah pembunuhan. namun, wartawan menyatakan bahwa peristiwa itu masih dalam dugaan. Tapi secara keseluruhan teks berita mengatakan bahwa pelaku pembunuhan adalah dilakukan oleh kelompok bersenjata, pernyataan ini juga di kuatkan oleh pernyataan narasumber, yang mengatakan pelaku pembunuhan adalah kelompok senjata. Namun tabloidjubi.com masih mengatakan peristiwa ini dengan dugaan, karena belum ada informasi kelanjutan atas tuduhan yang disampaikan.
-------------------------------	---

<i>Causal Interpretation</i>	Dalam peristiwa ini, Tabloidjubi.com menonjolkan bahwa kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya adalah pelaku dan penyebab masalah tewasnya 24 pekerja yang sedang bekerja membangun jalan trans Papua di Nduga. Sehingga media mendelegitimasi kelompok bersenjata sebagai pelaku dan penyebab masalah.
<i>Moral Evaluation</i>	Dalam peristiwa pembunuhan, Tabloidjubi.com menyatakan bahwa kelompok bersenjata adalah pelaku dan penyebab atas tewasnya 24 karyawan PT. Istaka Karya. Dengan memilih fakta seperti ini, tentu saja realitas yang hadir pada khalayak, wartawan mendefinisikan bahwa penyebab terjadinya pembunuhan adalah kelompok bersenjata di Nduga.
<i>Treatment Recommendation</i>	Tabloidjubi.com merekomendasikan agar kasus pembunuhan para karyawan PT. Istaka Karya diserahkan kepada personil gabungan TNI/Polri. Gambaran Tabloidjubi.com dalam penyelesaian peristiwa ini secara tidak langsung juga sangat memuji bahwa dengan mengesahkan tindakan TNI/Polri dapat menyelesaikan permasalahan.

Frame 2 : Gereja : Insiden Nduga berawal dari aksi protes warga

<i>Problem Identification</i>	Tabloidjubi.com mendefinisikan peristiwa 24 pekerja jalan trans Papua yang terbunuh berawal dari aksi protes warga dan pelimpahan kewenangan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada TNI untuk mengamankan proses pembangunan jalan trans Papua. Wartawan menggambarkan bahwa pelimpahan tersebut membuat warga takut akan kehadiran TNI dan pembangunan ini ditolak OPM dengan mengancam akan adanya perang. Pesan yang ingin disampaikan wartawan dalam berita ini adalah jika pembangunan proyek berlangsung OPM akan selalu mengganggu pekerjaan jalan trans Papua.
<i>Causal Interpretation</i>	Dalam permasalahan ini Tabloidjubi.com menggambarkan bahwa OPM-lah sebagai aktor penyebab peristiwa pembunuhan 24 pekerja jalan trans Papua, karena wartawan memberikan penonjolan dari pendefinisian masalah, bahwa OPM menolak pembangunan jalan trans Papua dan mengancam peperangan.
<i>Moral Evaluation</i>	Penilaian moral atas perlakuan kelompok bersenjata yang mengancam perang, mengakibatkan bahwa adanya korban bukan dari pihak yang bertikai, namun berdampak bagi pihak warga sipil di Nduga, baik itu pekerja jalan trans Papua maupun rakyat biasa. Sehingga berita itu mengidentifikasi bahwa tindakan kelompok bersenjata mengakibatkan warag sipil ikut menjadi korban.

<i>Treatment Recommendation</i>	Atas semua peran OPM tersebut, Tabloidjubi.com menyarankan kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak aparat keamanan.
---------------------------------	--

Frame 3 : Ini kesaksian korban dan mantan pekerja proyek di Yall Nduga

<i>Problem Identification</i>	Definisi pembungkaman yang dikembangkan Tabloidjubi.com dalam kasus pembunuhan 24 karyawan jalan trans Papua adalah masalah pelanggaran perjanjian. Wartawan menyampaikan, pada tahun 2017 OPM bersama perusahaan sudah pernah membuat perjanjian bahwa setiap 24 November sampai Desember, pekerjaan proyek jalan trans Papua diberhentikan. Mess atau tenda harus dikosongkan karena pada 1 Desember merupakan peringatan kemerdekaan kelompok bersenjata. Wartawan Tabloidjubi.com mendefinisikan permasalahan ini sebagai masalah pelanggaran perjanjian yang sudah ditetapkan.
<i>Causal Interpretation</i>	Dalam berita ini, OPM diposisikan sebagai pelaku dan penyebab masalah. Dengan menampilkan dan memilih fakta semacam ini media menampilkan bahwa OPM sebagai aktor yang ditempatkan sebagai penyebab yang mengakibatkan berbagai masalah tersebut.
<i>Moral Evaluation</i>	Dalam kasus ini, Tabloidjubi.com menggambarkan bahwa pekerjaan jalan trans Papua sering diganggu oleh kelompok bersenjata. ketika OPM melakukan seragan kontak senjata kepada TNI, mengakibatkan sejumlah pekerja terkena tembakan, lemparan batu, dan penganiyaan. Dengan pemberiaan fakta seperti ini, realitas yang hadir pada khalayak mendefinisikan bahwa OPM adalah pelaku utama kejahatan yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban.
<i>Treatment Recommendation</i>	Tidak ada penekanan penyelesaian.

Kriteria II : Ketika peristiwa berlangsung (situasi konflik)

<i>Frame</i>	<i>Problem Identification</i>	<i>Causal Interpretation</i>	<i>Moral Evaluation</i>	<i>Treatment Recommendation</i>
Pemprov Papua minta aparat keamanan tangkap pelaku pembunuhan di	Pelanggaran HAM.	Kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya.	Kelompok bersenjata mengganggu keamanan nasional.	Diminta aparat keamanan TNI/Polri menangkap para pelaku.

Nduga				
TPNPB : Itu serangan bersenjata, bukan eksekusi	Salah sasaran.	Kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya	20 orang menjadi korban dalam pembunuhan di Nduga Papua. 19 orang adalah pekerja PT. Istaka Karya dan satu orang personel TNI.	Kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya akan bertanggungjawab..
Komnas HAM sebut pelanggaran HAM, TPNPB : Ini kontak senjata, bukan eksekusi	Kejanggalan pernyataan.	Kelompok bersenjata pimpinan Egianus kogoya.	Tidak ada penekanan moral.	Tidak ada penekanan penyelesaian.
Sejak evakuasi dilakukan empat warga Nduga dilaporkan tewas, lainnya mengungsi ke hutan	Proses evakuasi, warga sipil jadi korban.	Aparat keamanan TNI/Polri.	Masyarakat lokal ketakutan dan mengungsi ke hutan-hutan dan 4 warga sipil tewas.	Tidak ada penekanan penyelesaian.
Gereja : Ratusan keluarga di Nduga mengungsi ke hutan	Operasi militer TNI/Polri meresahkan warga sipil.	Aparat keamanan TNI/Polri.	780 kepala keluarga mengungsi ke hutan.	Menghentikan kekerasan dan menyelesaikan permasalahan.
Tim evakuasi Kabupaten Nduga : Masyarakat masih dalam pengungsian	Situasi di Nduga belum aman.	Aparat keamanan TNI/Polri.	Masyarakat lokal trauma dan mengungsi.	Aparat keamanan TNI/Polri segera ditarik.
Pangdam Cenderawasih bantah ada majelis Gereja jadi korban TNI/Polri di Nduga.	Kontak senjata antar kelompok bersenjata dan TNI/Polri menyebabkan adanya masyarakat sipil menjadi korban.	Kelompok bersenjata dan TNI/Polri.	Ada empat warga yang menjadi korban.	Tidak ada penekanan penyelesaian.
Tiga warga sipil tewas di Nduga bukan anggota	Serangan udara	Aparat keamanan TNI/Polri	Warga sipil menjadi korban	Tidak ada penekanan penyelesaian.

TPNPB				
-------	--	--	--	--

Frame 1 : Pemprov Papua minta aparat keamanan tangkap pelaku pembunuhan di Nduga

<i>Problem Identification</i>	<p>Tabloidjubi.com mengidentifikasi kasus pembunuhan 24 pekerja PT. Istaka Karya adalah pelanggaran HAM. Wartawan menggambarkan bahwa perbuatan semacam itu tidak pantas dilakukan. Pembunuhan adalah perbuatan pelanggaran hak manusia.</p> <p>Secara tidak langsung tabloidjubi.com sudah melihat dan memandang kasus pembunuhan karyawan PT. Istaka Karya ini sebagai masalah yang melanggar peraturan HAM.</p>
<i>Causal Interpretation</i>	<p>Dalam berita, Tabloidjubi.com, kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya diposisikan sebagai pelaku (aktor) yang menyebabkan masalah. Kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya dituduh, karena sebelumnya sudah terlihat kalau pihak mereka mengganggu dan memantau pihak pekerja yang melakukan pembangunan proyek jalan trans Papua di Nduga. Karena ditempatkan sebagai penyebab masalah, berita ini secara keseluruhan mendelegitimasi kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Ini dapat dilihat dari bagaimana pernyataan narasumber yang disajikan oleh wartawan dan tersebut menempatkan penilaian pelanggaran HAM lebih menonjol diberikan kepada kelompok bersenjata.</p>
<i>Moral Evaluation</i>	<p>Penilaian atas kelompok bersenjata sebagai sumber masalah ini datang dari pernyataan para narasumber yang disajikan oleh wartawan. Narasumber yang disajikan oleh wartawan adalah pemerintah daerah Papua sendiri. Di mana mereka memaparkan bahwa operasi militer yang beroperasi di Nduga Papua sudah mengganggu keamanan nasional. Penilaian moral yang dikenakan kepada kelompok bersenjata menekankan bahwa tindakan yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah keterlaluhan. Pemaparannya ini secara menyeluruh mungkin tidak diurai secara detail namun tidak mungkin pemerintah setempat di Papua tidak mengetahui apa perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, sehingga berita itu mengidentifikasi bahwa kelompok bersenjata mengganggu keamanan nasional.</p>
<i>Treatment Recommendation</i>	<p>Atas semua peran kelompok bersenjata tersebut, Tabloidjubi.com merekomendasikan agar kasus dilakukan penyisiran oleh aparat keamanan TNI/Polri untuk menangkap para pelaku.</p>

Frame 2 : TPNPB : Itu serangan bersenjata, bukan eksekusi

<i>Problem Identification</i>	<p>Tabloidjubi.com mengidentifikasi kasus adalah salah sasaran. Wartawan memaparkan bahwa pihak TPNPB awal tahun 2018 sudah menyatakan</p>
--------------------------------------	--

	<p>peperangan dan sudah kurang lebih tiga bulan memantau pekerja jembatan jalan trans Papua. dalam hal ini, TPNPB sudah mempelajari gerak-gerik pekerja dan melihat para pekerja tersebut. TPNPB menyatakan bahwa pekerja jalan trans Papua adalah para anggota TNI Denzipur. Kemudian panglima daerah TPNPB Makodap III Ndugama Egianus Kogoya memerintahkan anggotanya untuk menyerang sejumlah orang yang bekerja dalam pembangunan jalan trans Papua. Sasaran yang mereka maksud dalam peristiwa tersebut adalah anggota TNI. Namun menjadikan tindakan tersebut menjadi salah sasaran. Serangan senjata yang mereka luncurkan malah menyebabkan karyawan PT. Istaka Karya, yakni warga sipil. secara tidak langsung Tabloidjubi.com sudah melihat dan menilai kasus pembunuhan ini menjadi tindakan salah sasaran.</p>
<i>Causal Interpretation</i>	<p>Dalam berita Tabloidjubi.com, kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya diposisikan sebagai aktor dan penyebab masalah. Berita ini di awal teks menceritakan pernyataan mereka ketika menghubungi pihak TPNPB menyatakan bertanggungjawab dalam peristiwa kontak senjata yang menyebabkan pekerja PT. Istaka Karya menjadi korban. Karena ditempatkan sebagai penyebab masalah, berita ini secara keseluruhan melegitimasi kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Hal ini dapat dilihat melalui teks berita yang wartawan sajikan dan adanya para pelaku tersebut menyatakan perbuatan mereka.</p>
<i>Moral Evaluation</i>	<p>Pembingkaihan kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya sebagai aktor penyebab masalah ini didukung oleh klaim-klaim moral, terutama dari pihak pekerja yang menjadi korban yang disebabkan kontak senjata yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. pernyataan dari TPNPB menyatakan bahwa mereka akan melakukan penyerangan dan sudah tiga bulan memantau para pekerja dan pekerjaan jembatan di Kali Awarok, Kali Yigi, dan Pos Mbua. Sebelum peristiwa itu terjadi, kelompok bersenjata sudah mempelajari gerak-gerik pekerja di daerah tersebut dan beranggapan bahwa para pekerja adalah anggota TNI. Dengan asumsi yang mereka gambarkan tersebut, mereka melakukan penyerangan. Namun dalam tindakan yang mereka lakukan, malah mengorbankan warga sipil yang jadi korban. Pernyataan dari kepolisian menyebutkan bahwa ada 20 orang yang menjadi korban, diantaranya adalah 19 pekerja PT. Istaka Karya dan satu personil TNI.</p>
<i>Treatment Recommendation</i>	<p>Secara tidak langsung Tabloidjubi.com menawarkan penyelesaian masalah dengan menyajikan pernyataan TPNPB yang bertanggungjawab atas adanya para pekerja PT. Istaka Karya menjadi korban terbunuh saat mereka melakukan kontak senjata. Hal ini dapat dilihat dari penilaian moral.</p>

Frame 3 : Komnas HAM sebut pelanggaran HAM, TPNPB : Ini kontak senjata, bukan eksekusi

<i>Problem Identification</i>	<p>Tabloidjubi.com mengidentifikasi bahwa permasalahan disebabkan oleh kejanggalan pernyataan. Hal ini dapat dilihat, dari pemaparan isi berita dan</p>
-------------------------------	---

	<p>pernyataan dari kedua belah pihak, pemerintah dan kelompok bersenjata. wartawan menggambarkan bahwa saat narasumber memberikan pernyataan mereka memiliki pandangan tersendiri dalam menjelaskan permasalahan konflik. Hal ini dapat dilihat dari pihak pemerintah adalah Komnas HAM. Pernyataan yang dia berikan bahwa kelompok bersenjata termasuk dengan kategori pelanggaran HAM serius, hal ini di gambarkan dari dua unsur pelanggaran HAM, akni menghilangkan nyawa dan mengakibatkan terhambatnya pekerjaan pelayanan publik. Komnas HAM menganggap bahwa tindak ini mengesahkan tindakan kepolisian dan kepentingan hukum. Selain itu pihak pemerintah, Komnas HAM mendengarkan kesakian korban yang selamat bahwa perlakuan mereka cukup sadis. Hal ini dapat dilihat dari isi berita :</p> <p><i>“Pada tanggal 1 Desember 2018, antara lokasi camp karyawan dengan kegiatan peringatan kelompok bersenjata ini cukup dekat kurang lebih 300 meter. Bahkan yang sangat aneh lagi, kata Ramandey, mereka mengundang perwakilan dari karyawan untuk mengikuti peringatan itu dengan bakar batu. Lalu sekitar pukul tiga sore mereka lakukan penyerangan dengan cara yang cukup sadis, yaitu mengikat 25 orang karyawan, lalu dari jam 3 sore itu menempuh jalan sepanjang sore hingga pagi di Gunung Kabo, lalu kemudian semua orang diikat dan perintah dari pimpinan mereka, dan diberondong dengan senjata secara sadis.”</i></p> <p>Tabloidjubi.com melihat bahwa pernyataan tersebut terlihat sedikit aneh. Dimana pihak pemerintah telah menggambarkan peristiwa tersebut memiliki kejanggalan dan aneh. Selain itu wartawan menambahkan bahwa kelompok bersenjata melakukan tuduhan menganggap seluruh karyawan adalah TNI. Sebaliknya, pernyataan dari karyawan yang selamat mengatakan bahwa kelompok bersenjata, sudah tahu siapa-siapa saja yang tentara dan siapa-siapa saja warga sipil dalam pembangunan jalan trans Papua. Secara jelas tergambar, bahwa sebelumnya kelompok bersenjata sudah mengenal warga sipil yang bukan aparat keamanan. Sehingga wartawan melihat bahwa penembakan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok bersenjata adalah benar mengenai anggota TNI sebagai korbannya, namun pemerintah bersih keras menyatakan bahwa korban adalah konflik menyebabkan warga sipil yang menjadi korban, bukan kepada anggota TNI.</p> <p>Sedangkan, informasi yang di nyatakan kelompok bersenjata adalah bahwa peristiwa yang disebabkan mereka adalah serangan bersenjata yang menewaskan TNI. Kelompok bersenjata yakin bahwa sasaran dan korban yang mereka maksud adalah benar adalah anggotai TNI. Selain itu, kelompok bersenjata membantah tuduhan yang diberikan pemerintah mengenai peristiwa yang dilakukan kelompok bersenjata merupakan eksekusi, melainka serangan bersenjata.</p> <p>Dalam menggambarkan pendefinisian masalah yang terjadi, Tabloidjubi.com meragukan pernyataan yang diberikan kedua narasumber</p>
--	--

	mereka. Sehingga Tabloidjubi.com memilih untuk menonjolkan secara keseluruhan informasi dari seluruh pihak para elit yang menjadi narasumber wartawan untuk menggambarkan konflik. Secara tidak langsung Tabloidjubi.com sudah melihat dan memandang permasalahan konflik memiliki kejanggalan, karena kedua belah pihak memiliki pernyataan yang berbeda, sehingga wartawan menonjolkan kedua pelaku dalam berita ini.
<i>Causal Interpretation</i>	<p>Dalam berita Tabloidjubi.com, kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya diposisikan sebagai pelaku (aktor) yang menyebabkan masalah. Secara keseluruhan isi berita tetap menggambarkan kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya</p> <p>Adalah pelaku dan penyebab dasar dari permasalahan. Karena, pernyataan yang disajikan Tabloidjubi.com mengidentifikasi kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya sebagai aktor, dapat dilihat dari pemaparan yang di berikan narasumber wartawan. Pernyataan ini tidak hanya saja di sajikan dari Komnas HAM sebagai narasumber wartawan, namun juga dari pihak pelaku menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan serangan senjata kepada pekerja jalan trans Papua. sehingga wartawan tetap menyajikan bahwa permasalahan terjadi karena penyebab dari kelompok bersenjata Egianus Kogoya.</p>
<i>Moral Evaluation</i>	Tidak ada penekanan moral.
<i>Treatment Recommendation</i>	Tidak ada penekanan penyelesaian.

Frame 4 : Sejak evakuasi dilakukan, empat warga Nduga dilaporkan tewas, lainnya mengungsi ke hutan

<i>Problem Identification</i>	Tabloidjubi.com mengidentifikasi proses evakuasi korban pembunuhan 24 pekerja PT. Istaka Karya menyebabkan adanya warga sipil yang menjadi korban. Saat TNI/Polri melakukan proses evakuasi, masyarakat menjadi korban sasaran penembakan. Pernyataan di perkuat wartawan dengan pernyataan narasumbernya yang menyampaikan bahwa TNI/Polri mengarahkan tembakan ke tempat tinggal warga. Secara tidak langsung Tabloidjubi.com melihat dan memandang kasus pembunuhan PT. Istaka Karya menjadi semakin luas, akibat serangan penembakan yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri.
<i>Causal Interpretation</i>	Dalam berita ini, Tabloidjubi.com melihat aparat keamanan TNI/Polri diposisikan sebagai penyebab masalah. Berita di awal teks menceritakan pernyataan bahwa ada masyarakat sipil yang menjadi korban TNI/Polri saat melakukan evakuasi. Karena ditempatkan sebagai penyebab masalah, berita ini secara keseluruhan mendelegitimasi aparat keamanan TNI/Polri. Hal ini dapat dilihat melalui teks berita yang disajikan dan adanya pengakuan dari narasumber, yakni tokoh dan pejabat setempat. Wartawan meyakini informasi tersebut, namun pihak dari aparat keamanan mengelak dan

	mengatakan mereka tidak ada melakukan penembakan tersebut, hanya pendorongan manusianya aja. Wartawan melihat keanehan dengan pernyataan narasumber tersebut. Bagaimana pernyataan yang disajikan narasumber seperti itu? Sehingga membuat wartawan tidak yakin dan menyajikan ulang pernyataan dari narasumber pejabat setempat, untuk memastikan kejadian yang berlangsung.
Moral Evaluation	Penilaian atas aparat keamanan TNI/Polri sebagai penyebab masalah ini datang dari pernyataan narasumber yang disajikan oleh wartawan. Narasumber yang disajikan oleh wartawan adalah pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Di mana mereka menyampaikan bahwa proses evakuasi yang dilakukan oleh aparat keamanan TNI/Polri sudah mengorbankan masyarakat lokal menjadi korban. Penilaian moral ini dikenakan kepada aparat keamanan TNI/Polri menekankan yang di nyatakan secara tidak langsung menyampaikan bahwa tindakan yang mereka lakukan itu sudah mengganggu kenyamanan hidup masyarakat. Data yang tersampaikan bahwa ada enam korban tewas dan empat korban luka-luka, pernyataan ini disajikan wartawan untuk melihat bahwa Penilaian moral yang dikenakan kepada aparat keamanan menekankan tindakan yang mereka lakukan tidak sepatutnya dilakukan, karena membuat masyarakat lokal ketakutan lari ke hutan, akibat penembakan secara sembarangan tersebut.
Treatment Recommendation	Tidak ada penekanan penyelesaian.

Frame 5 : Gereja : Ratusan keluarga di Nduga mengungsi ke hutan

Problem Identification	Tabloidjubi.com mengidentifikasi kasus yang terjadi di Nduga menjadi permasalahan yang berkepanjangan dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan bila menggunakan tindakan kekerasan. Wartawan menggambarkan bahwa kehadiran aparat keamanan TNI/Polri saat melakukan proses evakuasi korban pembunuhan PT. Istaka Karya, membuat warga sipil Papua ketakutan karena melakukan tindakan kekerasan. Secara tidak langsung Tabloidjubi.com sudah melihat dan memandangi penyelesaian kasus pembunuhan karyawan PT. Istaka Karya ini tidak dapat terselesaikan bila masih adanya aparat keamanan TNI/Polri melakukan operasi militer di Nduga.
Causal Interpretation	Dalam berita, Tabloidjubi.com, Aparat keamanan TNI/Polri diposisikan sebagai pelaku (aktor) yang penyebab masalah. Aparat keamanan TNI/Polri disampaikan bahwa melakukan kekerasan terhadap warga lokal saat melakukan proses evakuasi korban penembakan yang terjadi pada 1-2 Desember 2018. Keberadaan TNI/Polri digambarkan wartawan, membuat warga lokal takut dan memilih mengungsi ke hutan. Wartawan mengidentifikasi hal itu terjadi karena aparat keamanan saat proses evakuasi melakukan kekerasan terhadap warga sipil Papua. Karena berita sebelumnya sudah di sampaikan kalau pihak TNI/Polisi melakukan kekerasan bagi warga

	<p>sipil. sehingga berita ini secara keseluruhan mendelegitimasi aparat keamanan TNI/Polri dan ditempatkan sebagai penyebab masalah. Ini juga dapat dilihat dari bagaimana pernyataan narasumber yang di sajikan oleh wartawan dan menempatkan penilaian kehadiran TNI/Polri meresahkan warga sipil.</p>
<i>Moral Evaluation</i>	<p>Dalam berita Tabloidjubi.com, aparat keamanan TNI/Polri diposisikan sebagai pelaku (aktor) yang menyebabkan masalah, yang menyebabkan 780 kepala keluarga dari 5 klasis mengungsi ke hutan sejak mereka melakukan proses evakuasi. Secara keseluruhan isi berita tetap menggambarkan bahwa aparat keamanan TNI/Polri adalah menjadi pelaku dan penyebab masalah yang berkepanjangan. Keberadaan TNI/Polri digambarkan, membuat masyarakat Papua memilih untuk mengungsi karena ketakutan. Hal ini terlihat dari pernyataan isi berita yang disajikan wartawan. Sehingga, Tabloidjubi.com mengidentifikasi aparat keamanan TNI/Polri sebagai aktor penyebab masalah dan juga dapat dilihat dari pemaparan yang di berikan narasumber. Sehingga wartawan tetap menyajikan bahwa penyelesaian permasalahan dengan mengirim aparat TNI/Polri dalam menangani kasus di Nduga, tidak dapat terselesaikan bila pihak aparat masih berada di wilayah warga sipil Papua.</p>
<i>Treatment Recommendation</i>	<p>Atas semua peran yang dilakukan kelompok bersenjata dan aparat keamanan tersebut, Tabloidjubi.com merekomendasikan agar kasus dilakukan dengan menghentikan segala kekerasan dan menyelesaikan permasalahan dengan cara duduk bersama membicarakan permasalahan dalam konflik.</p>

Frame 6 : Tim evakuasi Kabupaten Nduga : Masyarakat masih dalam pengungsian

<i>Problem Identification</i>	<p>Tabloidjubi.com mengidentifikasi dalam proses evakuasi korban pembunuhan 24 pekerja PT. Istaka Karya, situasi di Nduga belum sepenuhnya aman. Hal ini menyebabkan karena adanya operasi militer yang dilakukan aparat keamanan TNI/Polri. Wartawan mengidentifikasi bahwa TNI/Polri masih melakukan proses evakuasi dan masyarakat masih memiliki rasa trauma sehingga masih mengungsi. Tabloidjubi.com juga melihat bahwa banyak informasi-informasi mengenai keadaan di Nduga sudah aman. Hal ini di pertegas Tabloidjubi.com bahwa keadaan di Nduga belum sepenuhnya aman di keseluruhan distrik. Tabloidjubi.com melihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum kembali ke wilayah mereka, karena operasi militer yang masih terus dilaksanakan TNI/Polri. Secara tidak langsung Tabloidjubi.com melihat dan memandang kasus pembunuhan PT. Istaka Karya menjadi semakin rumit akibat masih adanya operasi militer yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri.</p>
<i>Causal Interpretation</i>	<p>Dalam berita Tabloidjubi.com, Aparat keamanan TNI/Polri diposisikan sebagai aktor dan penyebab masalah. Berita ini di awal teks menceritakan</p>

	<p>bahwa operasi militer masih ada di wilayah Nduga. Sehingga kondisi di Nduga sepenuhnya belum aman. Berita ini secara keseluruhan di melegitimasi aparat keamanan TNI/Polri.</p> <p>Hal ini dapat dilihat melalui teks berita yang menyatakan bahwa TNI/Polri masih melakukan proses evakuasi, sehingga masih menyebabkan masyarakat lokal mengungsi dan trauma dengan kejadian sebelumnya.</p>
<i>Moral Evaluation</i>	<p>Penilaian atas operasi militer yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri sebagai sumber masalah, menyebabkan adanya tiga masyarakat yang menjadi korban yang meninggal dan membuat kondisi masyarakat sipil masih merasakan trauma dan mengungsi ke hutan. Selain itu wartawan juga menyampaikan bahwa masih ada empat korban penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata Egianus Kogoya belum ditemukan. Sehingga berita itu mengidentifikasi bahwa operasi militer yang dilakukan aparat keamanan menjadikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan.</p>
<i>Treatment Recommendation</i>	<p>Atas semua permasalahan yang masih ada, Tabloidjubi.com menyarankan agar aparat keamanan TNI/Polri segera ditarik, sehingga masyarakat mengungsi dapat kembali lagi ke wilayahnya.</p>

Frame 7 : Pangdam Cenderawasih bantah ada majelis Gereja jadi korban TNI/Polri di Nduga

<i>Problem Identification</i>	<p>Tabloidjubi.com mengidentifikasi keberlanjutan dari kasus pembunuhan 24 pekerja PT. Istaka Karya adalah terjadinya kontak senjata antar kelompok bersenjata dan TNI/Polri menyebabkan adanya masyarakat sipil menjadi korban. Wartawan menggambarkan bahwa dalam menangani konflik yang terjadi di Nduga, kedua belah pihak melakukan baku tembak sehingga mengakibatkan warga sipil menjadi korban. Secara tidak langsung Tabloidjubi.com sudah melihat dan menilai kasus konflik di Nduga ini mengakibatkan masyarakat sipil menjadi korban.</p>
<i>Causal Interpretation</i>	<p>Dalam berita Tabloidjubi.com, aparat keamanan TNI/Polri diposisikan sebagai aktor dan penyebab masalah. Karena saat melakukan proses evakuasi yang dilaksanakan TNI/polri, sempat terjadi kontak bersenjata yang menyebabkan warga lokal di Nduga menjadi korban. Sehingga berita ini secara keseluruhan melegitimasi aparat keamanan TNI/Polri dan kelompok bersenjata.</p> <p>Kelompok bersenjata dan TNI/Polri sebagai pihak yang menyebabkan masalah.</p>
<i>Moral Evaluation</i>	<p>Penilaian atas kontak senjata yang terjadi antar kelompok bersenjata dan TNI/Polri menyebabkan adanya masyarakat sipil menjadi korban. Tabloidjubi.com menyampaikan, akibat kontak senjata yang berlangsung ada empat warga yang menjadi korban. Sehingga berita itu mengidentifikasi bahwa kobtak senjata yang terjadi antar kelompok bersenjata dan TNI/Polri</p>

	menimbulkan adanya warga sipil yang menjadi korban.
<i>Treatment Recommendation</i>	Tidak ada penekanan penyelesaian.

Frame 8 : Tiga warga sipil tewas di Nduga bukan anggota TPNPB

<i>Problem Identification</i>	Tabloidjubi.com mengidentifikasi keberlanjutan dari kasus pembunuhan 24 pekerja PT. Istaka Karya adalah aparat keamanan melakukan serangan udara, yang menyebabkan empat warga sipil menjadi korban. Wartawan menggambarkan bahwa saat melakukan operasi militer yang dilakukan aparat keamanan TNI/Polri, mengakibatkan empat warga sipil menjadi korban terbunuh. Secara tidak langsung Tabloidjubi.com sudah melihat dan menilai kasus konflik di Nduga ini, saat aparat keamanan melakukan operasi militer mengakibatkan masyarakat sipil menjadi korban.
<i>Causal Interpretation</i>	Penilaian atas serangan udara yang dilakukan TNI/Polri untuk melakukan penangkapan pelaku pembunuhan pekerja PT. Istaka Karya mengakibatkan empat warga sipil menjadi korban. Tabloidjubi.com menyampaikan, akibat serangan udara yang dilakukan aparat keamanan TNI/Polri menyebabkan warga sipil menjadi korban, sehingga berita itu mengidentifikasi aparat keamanan TNI/Polri menjadi pelaku dan penyebab masalah.
<i>Moral Evaluation</i>	Penilaian atas serangan udara yang terjadi, adanya empat warga sipil yang menjadi korban, yang terdiri dari tiga remaja dan satu orangtua. Wartawan mengidentifikasi serangan udara yang dilakukan aparat keamanan TNI/Polri dengan melakukan penembakan dari helikopter dan bunyi tembakan yang mengakibatkan orangtua meninggal karena penyakit stroke. Secara keseluruhan wartawan menggambarkan aparat TNI/Polri dalam menangani konflik di Papua tidak berhati-hati.
<i>Treatment Recommendation</i>	Tidak ada penekanan penyelesaian.

Kriteria III : Setelah peristiwa berlangsung (upaya perdamaian)

<i>Frame</i>	<i>Problem Identification</i>	<i>Causal Interpretation</i>	<i>Moral Evaluation</i>	<i>Treatment Recommendation</i>
Lembaga dan aktivis HAM	operasi militer melakukan pelanggaran	Apaarat keamanan	Warga sipil Papua menjadi	minta aparat keamanan melakukan

minta aparat tidak membabi buta	HAM.	TNI/Polri.	korban.	investigasi cepat, menyeluruh, independen, dan tidak memihak terhadap serangan Nduga.
Konflik Nduga, Pemerintah diminta membuka akses dan perlindungan terhadap warga sipil	Wilayah Nduga dikuasi oleh pihak aparat keamanan TNI/Polri.	Aparat keamanan TNI/Polri .	Pemerintah Indonesia melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil.	Pemerintah pusat diminta cabut semua operasi militer.
Gubernur dan DPR Papua sepakat tarik aparat keamanan dari Nduga	Operasi militer meresahkan aktivitas warga sipil dalam menyambut natal.	Aparat keamanan TNI/Polri.	Penyisiran aparat keamanan TNI/Polri mengakibatkan orang asli Papua di Nduga menjadi korban.	Meminta Presiden Jokowi menarik pasukan dari Kabupaten Nduga.
Lukas Enembe : Amankan rakyat dan tangkap kelompok bersenjata di Nduga	Peristiwa Nduga mengakibatkan rakyat sipil menjadi korban.	Aparat keamanan TNI/Polri.	Segala tindakan yang menyangkut dengan kepentingan nasional harus di bicarakan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan bersama.	Meminta TNI/Polri segera menangkap kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya dan tidak mengganggu warga sipil.

Frame 1 : Lembaga dan aktivis HAM minta aparat tidak membabi buta

<i>Problem Identification</i>	Tabloidjubi.com mengidentifikasi tindakan operasi militer TNI/Polri telah melanggar HAM. Wartawan menunjukkan bahwa permasalahan dalam peristiwa di Nduga diakibat oleh aksi operasi militer yang tidak sesuai menambah permasalahan konflik semakin berbahaya.
--------------------------------------	---

<i>Causal Interpretation</i>	Tabloidjubi.com menggambarkan bahwa aktor dan penyebab masalah adalah Aparat Keamanan TNI/Polri. Wartawan menyatakan bahwa kehadiran TNI/Polri hanya membuat suasana di Nduga semakin memburuk dan menakuti warga lokal.
<i>Moral Evaluation</i>	Penilaian moral yang dikenakan wartawan kepada TNI/Polri adalah menekankan bahwa tindakan operasi militer yang dilakukan TNI/Polri mengganggu kebebasan dan melanggar hak asasi manusia. Tabloidjubi.com menggambarkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan TNI/Polri tidak sepatutnya dilakukan, karena hal tersebut membuat dampak besar bagi warga sipil di Nduga.
<i>Treatment Recommendation</i>	Tabloidjubi.com merekomendasikan agar keberadaan TNI/Polri saat melakukan pengejaran kelompok bersenjata harus melakukan tugas dengan investigasi cepat, menyeluruh, independen, dan tidak memihak terhadap serangan Nduga. Tabloidjubi.com meminta aparat keamanan TNI/Polri melakukan operasi pencarian pelaku penembakan dengan profesional dan kompeherensif tanpa mengganggu kebebasan dan hak warga sipil.

Frame 2 : Konflik Nduga, Pemerintah diminta membuka akses dan perlindungan terhadap warga sipil

<i>Problem Identification</i>	Tabloidjubi.com mengidentifikasi keberlanjutan peristiwa yang terjadi disebabkan adanya penguasaan pihak aparat keamanan TNI/Polri di wilayah Nduga, saat melakukan pengejaran para pelaku kejahatan OPM. Operasi militer yang dilakukan TNI/Polri menjadi warga sipil sebagai korban. Wartawan menjelaskan bahwa operasi militer yang dikerahkan pemerintah dan aparat keamanan sangat mengganggu masyarakat sipil Papua dalam melangsungkan hidup mereka.
<i>Causal Interpretation</i>	Tabloidjubi.com menyatakan bahwa masalah yang terjadi disebabkan oleh operasi militer yang dilakukan aparat keamanan TNI/Polri ketika mengejar para pelaku kejahatan. Tabloidjubi.com menggambarkan operasi militer yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri hanya mengakibatkan warga sipil menjadi korban.
<i>Moral Evaluation</i>	Penekanan moral yang diberikan Tabloidjubi.com adalah bahwa tindakan operasi militer TNI/Polri hanya mengacaukan kehidupan masyarakat lokal. Wartawan menggambarkan tindakan ini berasal dari pemerintah pusat Indonesia sendiri, di mana pemerintah dianggap hanya menambah kekacauan ketika menyelesaikan permasalahan konflik di Nduga yang menyebabkan trauma bagi masyarakat sipil seperti orangtua dan anak-anak..
<i>Treatment Recommendation</i>	Tabloidjubi.com meyarankan secara tidak langsung agar pemerintah pusat untuk mencabut segala operasi militer TNI/Polri yang telah mereka gerakkan. Operasi militer digambarkan wartawan sudah membuat trauma kepada masyarakat sipil karena bertindak dengan sikap yang arogan. Selain itu Tabloidjubi.com meminta pemerintah pusat harus turun tangan untuk

	melihat langsung kondisi lapangan yang sebenarnya.
--	--

Frame 3 : Gubernur dan DPR Papua sepakat tarik aparat keamanan dari Nduga

<i>Problem Identification</i>	Tabloidjubi.com mendefinisikan operasi militer yang dilakukan TNI/Polri hanya meresahkan aktivitas warga sipil. Wartawan melihat bahwa TNI/Polri banyak melanggar peraturan penegakan hukum sehingga memberikan dampak bagi masyarakat sipil. Saat melakukan penyisiran aparat TNI/Polri mengakibatkan banyaknya masyarakat sebagai korban dalam pencarian para pelaku penembakan yang sudah dilakukan oleh OPM.
<i>Causal Interpretation</i>	Tabloidjubi.com menggambarkan pelaku dan penyebab masalah ini adalah dilakukan oleh aparat keamanan TNI/Polri. Wartawan mencoba memperlihatkan bahwa tindakan operasi militer yang dilakukan TNI/Polri hanya menakut-nakuti warga lokal di Nduga.
<i>Moral Evaluation</i>	Penilaian moral mendefinisikan masalah, bahwa penggerakan pencarian para pelaku kejahatan yang dilakukan TNI/Polri hanya menghilangkan nyawa orang asli Papua. Wartawan menggambarkan bahwa yang menjadi incaran TNI/Polri adalah warga sipil yang tidak tahu permasalahan yang terjadi, bukan kepada pihak kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Wartawan memilih fakta seperti ini, agar realitas yang hadir pada khalayak mendefinisikan bahwa TNI/Polri telah mengganggu semua warga sipil merupakan anggota dari OPM.
<i>Treatment Recommendation</i>	Penyelesaian masalah yang diberikan wartawan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah meminta Presiden Jokowi untuk mencabut seluruh pasukan TNI/Polri yang dikerahkan dalam mengamankan situasi di Papua dan mengejar para pelaku kejahatan. Wartawan menggambarkan penggerakan yang diturunkan oleh pemerintah pusat hanya mengakibatkan dampak konflik yang besar, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat menjadi korban, maka penyelesaian yang digambarkan wartawan adalah bahwa aparat keamanan TNI/Polri harus di ambil ahli dari wilayah Nduga Papua, sehingga konflik tidak menjadi berkepanjangan.

Frame 4 : Lukas Enembe : Amankan rakyat dan tangkap kelompok bersenjata di Nduga

<i>Problem Identification</i>	Wartawan mendefinisikan bahwa masalah konflik di Nduga hanya mengakibatkan rakyat sipil menjadi korban dan permasalahan yang berkepanjangan. Tabloidjubi.com menggambarkan bahwa semua tindakan dalam menangani konflik yang di gerakkan pemerintah pusat hanya menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban. Sehingga masalah ini menjadi pemicu permasalahan yang berkepanjangan dalam konflik, yang menyebabkan kerugiaan bagi warga sipil menjadi korban.
--------------------------------------	---

<i>Causal Interpretation</i>	Pelaku dan penyebab masalah ini ditunjukkan Tabloidjubi.com kepada aparat keamanan TNI/Polri. Tabloidjubi.com melihat peristiwa penangkapan pelaku kejahatan yang dilakukan TNI/Polri hanya menjadikan warga sipil yang menjadi korban, yang bukan berfokus melakukan penampakan para pelaku.
<i>Moral Evaluation</i>	Penekanan moral yang digambarkan wartawan dalam berita ini adalah dalam melakukan penanganan pencarian para pelaku penembakan, aparat keamanan TNI/Polri harus terlebih dahulu menyampaikan kasus-kasus atau permasalahan yang menyangkut kepentingan nasional dan di informasikan kepada publik agar mendapatkan kesepakatan bersama, bukan mengambil tindakan sesuka hatinya ketika melakukan penangkapan yang menunudu korban sebagai pelaku kejahatan.
<i>Treatment Recommendation</i>	Rekomendasi penyelesaian masalah yang diberikan Tabloidjubi.com adalah bahwa TNI/Polri tetap melaksanakan kewajibannya dalam menangkap kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya, namun menyarankan operasi militer yang dilakukan TNI/Polri tidak lagi mengganggu warga sipil yang tidak menyangkut permasalahan dalam konflik.

Lampiran Foto



Ilustrasi penembakan - IST



Ruas Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga - Kementerian PUPR



Satu korban selamat yang dari Distrik Mbua saat diwawancarai di Batalyon 756/WMS - Jubi/Islami



Jalan trans Papua – Jubi/IST



Evakuasi korban penembakan dari lokasi kejadian saat di evakuasi ke RSUD Wamena-
Jubi/Islami



Anggota TPNPB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya - IST



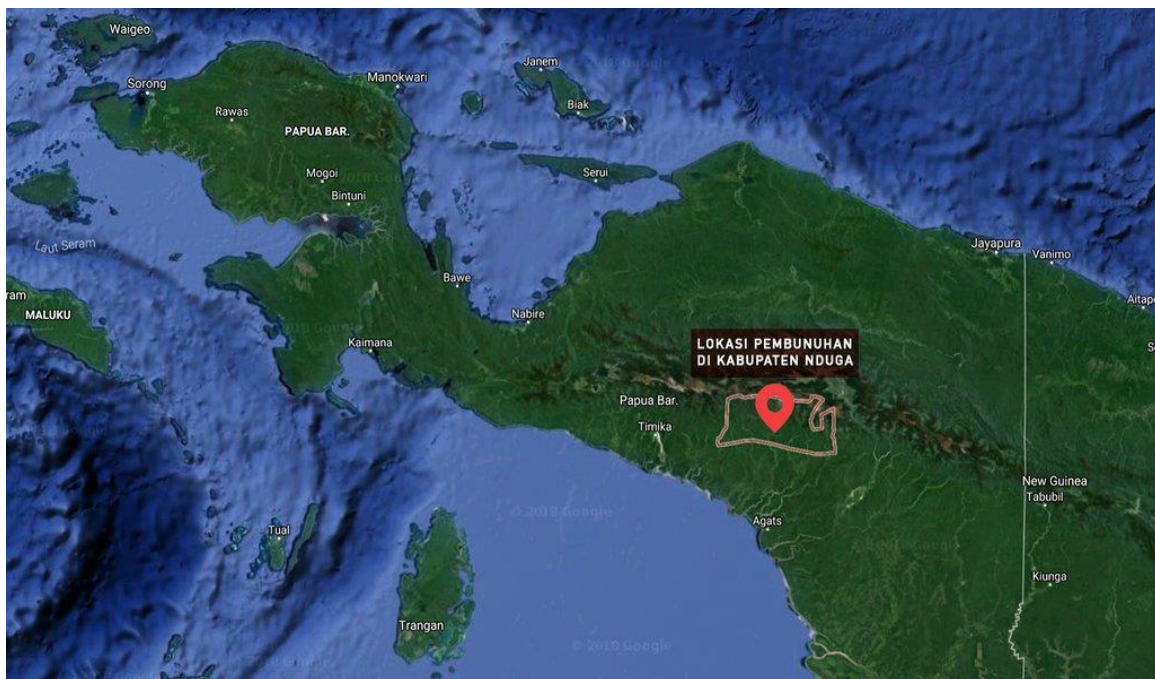
Pasukan tambahan yang dikirimkan ke Nduga saat proses evakuasi (5/12/2018) - Jubi/Islami



Pada bulan Juli 2018, masyarakat yang tinggal di Nduga sempat mengungsi keluar dari Nduga menuju Timika, Asmat dan Wamena karena konflik bersenjata yang diikuti dengan penyisiran di sekitar Kampung Alguru - Dok. Jubi



Foto kondisi masyarakat di Distri Mbua, kabupaten Nduga yang diambil saat tim evakuasi pemerintah Nduga turun - Jubi/IST



Peta lokasi penembakan di Nduga Papua



Jenazah Mianus Lokbere ditemukan oleh masyarakat hanya sekitar 300 meter dari lapangan terbang Mbua - Dok. Jubi

Kriteria I : Sebelum peristiwa berlangsung (pemicu konflik)

24 pekerja jalan trans Papua di Nduga tewas dibunuh

Jayapura, Jubi – 24 orang pekerja Jalan Trans Papua yang sedang bekerja di Kabupaten Nduga diduga tewas dibunuh oleh kelompok bersenjata yang beroperasi di Nduga.

Wakil Ketua DPRD Nduga, Alimin Gwijange yang dihubungi Jubi, Selasa (4/12/2018) pagi mengatakan 24 pekerja tersebut tewas dibunuh oleh kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya.

“Ya benar. Ada 24 orang yang dibunuh. Dua lainnya melarikan diri,” kata Alimin Gwijangge.

Gwijangge mengatakan saat kejadian ia sedang berada di Timika dalam perjalanan menuju Jayapura untuk mengikuti Diklat. Namun setelah mendengar kabar tersebut, ia kembali ke Nduga.

Mengenai apakah mereka ditembak atau dibunuh dengan senjata tajam atau barang lainnya, Gwijangge belum bisa mengkonfirmasi. Menurutnya, korban tewas ada

di satu tempat yang hanya bisa dijangkau dengan jalan darat dan komunikasinya hanya menggunakan SSB.

Pada Senin (3/12/2018) sekitar pukul 15.30 waktu setempat melalui Radio SSB, Pendeta Wilhelmus Kogoya (tokoh gereja distrik Yigi) menyampaikan telah terjadi pembunuhan 24 orang di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yall Nduga.

Menurut Pendeta Wilhelmus Kogoya pembunuhan 24 orang tersebut terjadi pada hari Minggu. Para korban meninggal 24 orang tersebut merupakan pekerja jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak. Dua tukang melarikan diri dan selamat namun belum diketahui keberadaan mereka.

24 pekerja jalan ini merupakan karyawan PT. Istaka Karya, BUMN yang mengerjakan proyek jalan Trans Papua.

Berikut nama-nama 24 orang karyawan PT Istaka di Distrik Yall yang diduga tewas dibunuh :

1. Jhony Arung
2. Anugrah
3. Alrpianus
4. Muh. Agus
5. Aguatinus T
6. Martinus Sampe
7. Dirlo
8. Matius
9. Emanuel
10. Calling
11. Dani
12. Tariki
13. Markus Allo
14. Aris Usi
15. Muh. Faiz
16. Yusran
17. Ayub
18. Yosafat
19. M.Ali Akbar
20. Petrus Ramli
21. Hardi Ali
22. Efrandi Hutagaol
23. Rikki Simanjuntak
24. Marg Mare

Saat ini, polisi sedang mengejar pelaku pembunuhan.

"Saat ini personil gabungan TNI/Polri telah diterjunkan untuk mengecek informasi tersebut dan selalu siap melakukan evakuasi terhadap para korban dan menangkap para pelaku," tulis Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, S.H melalui rilis kepolisian daerah Papua, Senin malam. (*)

Gereja : Insiden Nduga berawal dari aksi protes warga

Jayapura, Jubi - Ketua Sinode Gereja Kemah Inji (Kingmi) Papua, Pdt. Dr Benny Giay mengatakan kejadian pembunuhan terhadap 24 pekerja jalan trans di Nduga berawal dari aksi protes warga terhadap anggota TNI yang memotret aktivitas ibadah warga pada 1 Desember 2018.

"Ada ibadah yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan satu orang yang diduga anggota TNI," ungkap Pendeta Giay meneruskan laporan jemaat gereja Kingmi di Nduga kepada Jubi, Rabu (5/12/2018).

Warga masyarakat yang ikut kegiatan ibadah itu merasa tidak nyaman karena orang tersebut memotret kegiatan mereka.

"Masyarakat takut. Mereka minta dia hapus tapi orang itu tidak mau," lanjut pimpinan gereja yang umatnya sangat dominan di Kabupaten Nduga.

Lalu, orang tersebut meninggalkan tempat kegiatan ibadah menuju pos TNI. Usaha masyarakat untuk menghapus foto tidak berhasil.

Peristiwa dalam ibadah 1 Desember itu berlanjut pada 2 Desember 2018. Masyarakat datang meminta agar foto mereka dihapus. Lalu terjadi tembak menembak dekat pos tentara sehingga korban berjatuh mencapai puluhan orang.

"Kejadian itu lanjutannya," ungkap dia.

Pendeta Giay menambahkan polemik tentang korban yang tewas adalah warga sipil atau militer bisa merujuk pada kebijakan Presiden Jokowi pada tahun 2016 saat berkunjung ke Wamena.

"Intinya Presiden Joko Widodo kasih kepercayaan kepada TNI bangun jalan itu pada 2016 saat berkunjung ke Wamena," ungkapnya.

Tidak lama, usai pelimpahan kewenangan itu, Januari 2017, sayap militer organisasi Papua merdeka yang beroperasi wilayah itu menolak Pembangunan jalan disertai ancaman perang.

Karena itu, menurut Pendeta Giay, tidak salah jika warga mencurigai para pekerja jalan itu sebagai anggota TNI. Warga paham bahwa bukan warga sipil sembarangan yang menjadi karyawan di wilayah yang jelas ancaman keamanannya itu.

Terpisah, Sekretaris Perusahaan PT. Istaka Karya Yudi Kristanto memastikan bahwa karyawan perusahaan yang bertugas membangun jembatan di Kabupaten Nduga, Papua tersebut berjumlah 28 orang. 28 orang pekerja tersebut merupakan pekerja lapangan dan bertanggung jawab atas pembangunan jembatan Kali Yigi-Kali Aworak.

Ia juga memastikan jika selama ini tidak pernah ada masalah dalam pembangunan jembatan di Kali Yigi dan Kali Aworak.

“Sampai saat ini belum diketahui identitas karyawan yang telah menjadi korban. Saat ini PT Istaka Karya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak aparat keamanan,” kata Yudi. (*)

Ini kesaksian korban dan mantan pekerja proyek di Yall, Nduga

Wamena, Jubi – Dua orang yang merupakan tenaga tukang pembangunan SMP dan Puskesmas di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga yang berhasil selamat dalam penyerangan pos TNI di Mbua memberikan kesaksiannya tentang kejadian yang terjadi di Distrik Yal.

Saleh seorang pekerja pembangunan Puskesmas di Mbua mengaku, saat terjadi penyerangan pos TNI di Mbua 3 Desember 2018 pagi setelah terjadi penembakan sejumlah pekerja di Distrik Yall, ia bersama sejumlah anggota dan pekerja lainnya mengosongkan pos sekitar pukul 23.00 WP.

“Setelah kami kosongkan pos karena diserang itu, kami lari ke hutan sambil membawa jenazah anggota TNI yang tewas tertembak untuk menyembunyikan jenazah,” kata Saleh kepada wartawan saat di Batalyon 756/WMS, Rabu (5/12/2018).

Ia menjelaskan, selama menyelamatkan diri itu ia bersama rekan pekerja buruh bangunan lainnya yang lari ditambah anggota TNI, saling bergantian mengangkat jenazah anggota TNI yang tewas menuju tempat yang dirasa aman ke arah Wamena.

“Kami menyelamatkan diri dari jam lima pagi hingga jam 7 malam sampai bisa ditemui tim aparat gabungan yang sudah tiba di Mbua. Yang menyerang kita ini ada mungkin puluhan orang,” ujar Saleh.

Seorang saksi lainnya, Makbul yang menjadi buruh bangunan SMP Mbua mengungkapkan, pos TNI Mbua diserang mulai pukul 05.00 WP pagi dan terjadi kontak senjata hingga malam hari pukul 19.00 WP.

“Pada saat penyerangan pos TNI itu, kebetulan ada empat orang yang berhasil lolos saat penembakan di distrik Yall yang kabur ke pos TNI sehingga kami diserang,” kata Makbul.

Saat penyerangan pos, kata dia, ada sejumlah pekerja yang terkena tembakan, lemparan batu dan penganiyaan lainnya, ada pula yang pura-pura meninggal dan semuanya berhasil lolos.

“Kita bergantian pikul jenazah sambil melarikan diri, kalau kita tidak lari semua pasti jadi korban,” kata Makbul.

Pekerja proyek pernah diperingatkan oleh TPNPB

Sedikit berbeda apa yang disampaikan mantan karyawan PT. Istaka Karya, Nathal. Meski kesaksiannya ini terjadi di 2017, namun pengalamannya selama bekerja sebagai seorang operator alat berat di proyek jalan dan jembatan Habema-Mugi ia sempat mengalami hal-hal yang dianggap rawan juga.

Ia mengaku, sejak bekerja di 2017 dirinya sempat meminta agar pekerja dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari perusahaan sebagai pegangan atau jaminan bagi keluarganya.

“Permintaan saya itu sempat ditunda sampai saya akhirnya naik ke lokasi proyek,” kata Nathal.

Ia menceritakan, awal pekerjaan dilakukan memang seluruh karyawan selalu dikawal oleh pihak keamanan minimal enam orang dan setiap minggu bergantian, bahkan mereka pun tinggal satu camp dengan aparat.

“Satu camp dengan aparat saja kita masih sering diganggu, macam pelemparan atau pengejaran. Setelah itu, pak Jhoni Arung (pimpinan proyek) berpandangan jika kita terus dikawal aparat, kita akan diganggu terus karena aparat yang akan dikejar terus, bukan kita pekerja,” ujar dia.

Setelah itu disaat ada pergantian aparat keamanan, katanya, Jhoni menyampaikan ke pimpinan perusahaan maupun keamanan untuk tidak lagi menggunakan aparat tetapi memberdayakan masyarakat lokal untuk turut mengawal pekerjaan.

“Kita pakai masyarakat di sana, sedikit aman karena bisa beradaptasi tetapi itu tidak bisa menjamin juga karena mereka kadang baik dan kadang keras,” ujarnya.

Namun ia menjelaskan jika selama pekerjaan dilakukan, kelompok bersenjata di wilayah Nduga bersama perusahaan pernah membuat perjanjian bahwa setiap tanggal 24 November mess atau camp harus dikosongkan, karena pada 1 Desember merupakan hari peringatan kelompok bersenjata tersebut.

“Waktu itu sekitar November 2017, dibuat perjanjian bahwa setiap tanggal 24 November mess atau camp harus dikosongkan karena 1 Desember itu perayaannya mereka dan itu diharuskan. Tetapi waktu itu kita turun tanggal 27 November 2017. Walaupun pimpinan proyek di lapangan waktu itu bersikeras bertahan, saya berpikir kalau kami bertahan di sini siapa yang bisa tanggungjawab kami punya nyawa? Sehingga saya bersama rekan-rekan kosongkan mess,” katanya.

Tak lama setelah itu, pasca ada kejadian penembakan operator dan anggota TNI ditembak di wilayah Nduga, ia dan pekerja lainnya disuruh kembali naik bekerja. Namun ketika mau ke lokasi proyek, para pekerja ini ditahan oleh aparat keamanan di Mbua dan diminta untuk kembali ke Wamena.

“Kita disuruh naik lagi sama pimpinan proyek dan sebagai anak buah kita ikuti perintah. Sampai disana, kita ditahan sama aparat di Mbua dan disuruh kembali ke Wamena karena akan dilakukan penyisiran. Padahal aparat saja tidak bisa naik, sehingga sampai di Pos Mbua di suruh kembali,” katanya.

Karenanya, ia sangat menyesalkan kejadian di Distrik Yall tanggal 2 Desember 2018. Mengapa di awal Desember para karyawan masih berada di camp proyek, padahal sudah jelas masuk akhir November itu sudah harus dikosongkan.

“Saya kecewa dengan kejadian ini, kenapa sudah Desember masih berada di camp padahal sudah harus dikosongkan karena sudah peraturan dari kelompok bersenjata.

Ia juga mengaku pernah mendapatkan surat dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di wilayah tersebut pada November 2017 yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan pimpinan proyek. Saat itu tiga orang datang ke camp pada malam hari menyerahkan surat yang isinya memerintahkan para pekerja jangan mengganggu kegiatan kelompok bersenjata ini selama bulan desember.

“Mereka bilang karena kami (TPN-OPM) juga tidak akan mengganggu kalian, karena kami ingin merdeka. Karena Desember itu perayaan kami sehingga tolong hargaai kami. Tetapi saya baca begitu langsung besoknya kita kabur, dan surat untuk pak Jokowi dibawa pimpinan proyek,” ujar dia.

Lanjutnya, selama bekerja sepanjang 2017 ia sering mengalami gangguan, hingga keluar dari perusahaan PT Istaka Karya April 2018. Ia merasa tidak ada jaminan keamanan, bahkan SPK yang diminta karyawan pun tidak kunjung dibuatkan.

“April 2018 saya berhenti dari pekerjaan, karena saya berfikir tidak pernah ada SPK untuk menjamin pekerja sehingga saya kabur saat mau naik ke lokasi proyek. Walau begitu selain di bulan Desember pun, OPM saat ketemu dengan kami, mereka bawa senjata, tidak pernah kami diganggu,” tutup dia. (*)

Kriteria II : Ketika peristiwa berlangsung (situasi konflik)

Pemprov Papua minta aparat keamanan tangkap pelaku pembunuhan di Nduga

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua minta aparat keamanan (TNI/Polri) segera memastikan informasi terkait pembunuhan 24 pekerja PT. Istaka Karya yang terjadi di Distrik Yall, Kabupaten Nduga. Jika hal itu benar, segera menangkap para pelaku.

Asisten Bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa, mengatakan sebagai mantan *caretaker* Bupati Nduga, dirinya minta pemerintah dan masyarakat setempat untuk membantu serta memfasilitasi aparat keamanan untuk menyisir lokasi penembakan.

"Orang-orang pengacau keamanan itu perlu diberantas. Saya harap masyarakat dan pemerintah di Nduga supaya membantu aparat keamanan," kata Wakerkwa, kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (4/12/2018).

Menurut ia, harus ada operasi secara nasional karena kelompok bersenjata yang beroperasi di Nduga sudah mengganggu keamanan nasional.

"Kelompok bersenjata sudah menghilangkan nyawa 24 pekerja, jelas ini sudah keterlaluhan dan perlu ditindak tegas," ujarnya.

Apa yang dilakukan kelompok ini, ujar ia, sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. "Pembunuhan secara brutal jelas sudah pelanggaran HAM. Buka jalan seluas-luasnya untuk aparat melakukan penyisiran, agar pelaku segera ditangkap dan diadili," kata Doren Wakerkwa.

Wakil Ketua DPRD Nduga, Alimin Gwijange, mengatakan 24 pekerja PT. Istaka Karya tewas dibunuh kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya.

"Ya benar. Ada 24 orang yang dibunuh. Dua lainnya melarikan diri," kata Gwijangge.

Gwijangge mengatakan saat kejadian ia sedang berada di Timika dalam perjalanan menuju Jayapura untuk mengikuti diklat. Namun setelah mendengar kabar tersebut, ia kembali ke Nduga.

Mengenai apakah mereka ditembak atau dibunuh dengan senjata tajam atau barang lainnya, Gwijangge belum bisa mengkonfirmasi. Menurutnya, korban tewas ada di satu tempat yang hanya bisa dijangkau dengan jalan darat dan komunikasinya hanya menggunakan SSB. (*)

TPNPB : Itu serangan bersenjata, bukan eksekusi

Jayapura, Jubi - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) akhirnya buka suara terkait dugaan pembunuhan yang dituduhkan kepada mereka. TPNPB mengaku sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penembakan beberapa orang yang disebut sebagai karyawan PT. Istaka Karya yang tengah membangun jalan Trans Papua.

"Kami yang bertanggungjawab. Ada kontak senjata. Itu serangan bersenjata, bukan eksekusi seperti yang disampaikan aparat keamanan Indonesia," ungkap juru bicara TPNPB, Sebby Sambom kepada Jubi melalui sambungan telepon, Rabu (5/12/2018), membantah keterangan aparat keamanan Indonesia yang menyebutkan para pekerja dibunuh dengan cara eksekusi.

Kapendam Cenderawasih, Kolonel Muhamad Aidi sebelumnya mengatakan karyawan PT Istaka Karya dieksekusi di sebuah tempat bernama Puncak Kabo.

Panglima Daerah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Makodap III Ndugama Egianus Kogeya, lanjut Sebby telah memerintahkan Pemne Kogoya untuk menyerang sejumlah orang di kali Aworak, Kali Yigi dan Pos TNI Distrik Mbua.

Lanjutnya, TPNPB sudah cukup lama memantau para pekerja di kali Aworak dan Kali Yigi.

“Mereka itu anggota militer, Denzipur. Bukan pekerja sipil,” lanjut Sebby yang ketika dihubungi sedang berada di Papua Nugini.

Pada tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadikan Zeni TNI AD sebagai mitra kerja membuka trans Papua. Langkah ini melanjutkan kebijakan Presiden SBY yang menerbitkan Kepres No. 40 Tahun 2013 yang menjadi dasar keterlibatan TNI dalam pembangunan Jalan Trans Papua yang sebelumnya bernama Jalan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B)

Zeni Angkatan Darat mengerahkan sejumlah 394 orang personel dengan komposisi meliputi Denzipur-10 dan Denzipur-12, mengerjakan ruas jalan Wamena-Habema dan Habema-Mbua. Yonzipur-18, mengerjakan ruas jalan Mbua-Mugi dan Mugi-Paro, sedangkan dari Yonzikon-14 mengerjakan ruas jalan Paro-Kenyam dan Kenyam-Mamugu, dengan kekuatan tiap kelompok berjumlah 107 personel.

Kurang lebih tiga bulan lamanya TPNPB memantau pekerja Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi dan Pos Mbua. Selama tiga bulan itu, mereka mempelajari gerak-gerik pekerja di kali Aworak, Kali Yigi hingga Pos TNI Distrik Mbua.

“Mereka yang bekerja di Kali Aworak, Kali Yigi murni Anggota TNI dari Zeni Tempur. Selama ini TPNPB juga tahu yang berkerja pada proyek Jalan Trans dan Jembatan-Jembatan yang ada sepanjang Jalan Habema, Juguru, Kenyam hingga Batas Batu adalah Anggota TNI,” jelas Sebby.

Sehingga menurutnya, sekalipun orang-orang tersebut berpakaian sipil atau preman, mereka tetap saja anggota militer.

Sebby juga menyebutkan TPNPB bukanlah kelompok kriminal sebagaimana yang sering disebutkan oleh aparat keamanan Indonesia. TPNPB adalah tentara pembebasan nasional rakyat Papua Barat yang bertujuan membebaskan Papua Barat dari Indonesia.

"kami sudah sampaikan pernyataan perang pada awal tahun 2018 ini," ujar Sebby.

Dikutip tirto.id, secara terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut 20 orang menjadi korban dalam pembunuhan di Nduga, Papua. 19 orang adalah pekerja PT Istaka Karya dan seorang lagi personel TNI.

"Informasi sementara adalah 20 [korban]," kata Tito saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/12/2018). (*)

Komnas HAM sebut pelanggaran HAM, TPNPB: Ini kontak senjata, bukan eksekusi

Wamena, Jubi – Kepala kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua, Frits Ramandey mengungkapkan jika kasus penembakan terdapat karyawan PT. Istaka Karya di Distrik Yal dan Yigi, 2 Desember 2018 oleh kelompok bersenjata, merupakan suatu pelanggaran HAM serius.

Pasalnya, aksi itu memenuhi unsur pelanggaran HAM, di mana terdapat dua pelanggaran. Pertama telah menghilangkan nyawa seseorang memenuhi unsur definisi pelanggaran HAM, kedua tindakan mereka ini mengakibatkan terhambatnya pemenuhan pelayanan publik terhadap masyarakat yang ada di sekitaran distrik Yal, Yigi dan sekitarnya.

“Karena jalan tidak bisa baik, warga di sana butuh makan, butuh layanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya sehingga ada dua unsur serius yang dilanggar,” kata Frits kepada wartawan di Wamena, Kamis (6/12/2018).

Selain itu kata dia, tindakan ini mengesahkan tindakan kepolisian dan tindakan penegakan hukum, sehingga polisi dan TNI tak perlu lagi mendapat dukungan karena perbuatan ini mengesahkan tindakan Kepolisian dan TNI untuk kepentingan hukum.

Namun ia pun menjelaskan setelah mendengar kesaksian korban selamat memang cukup sadis, namun sedikit aneh karena acara pada tanggal 1 Desember 2018, antara lokasi camp karyawan dengan kegiatan peringatan kelompok bersenjata ini cukup dekat kurang lebih 300 meter.

Bahkan yang sangat aneh lagi, kata Ramandey, mereka mengundang perwakilan dari karyawan untuk mengikuti peringatan itu dengan bakar batu. Lalu sekitar pukul tiga sore mereka lakukan penyerangan dengan cara yang cukup sadis, yaitu mengikat 25 orang karyawan, lalu dari jam 3 sore itu menempuh jalan sepanjang sore hingga pagi di Gunung Kabo, lalu kemudian semua orang diikat dan perintah dari pimpinan mereka, dan diberondong dengan senjata secara sadis.

“Saya pikir ini tindakan yang tidak manusiawi dan tidak ada orang yang tidak punya alasan untuk tidak memberi alamat kutuk terhadap mereka,” ujar dia.

Ia menyebutkan, jika tuduhan kelompok bersenjata ini jika seluruh karyawan tersebut adalah TNI, padahal jika mendengar testimoni dari karyawan yang selamat, dua minggu sebelum kejadian maupun beberapa kali melintas, mereka (kelompok bersenjata) pun tahu siapa-siapa yang tentara dan siapa yang sipil baik di Mbua maupun di Yigi.

Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa mereka bisa sadis melakukan ini dengan cara mengikat korban yang tidak berdaya, menyita seluruh barang korban lalu menembak dengan menggunakan tiga senjata laras panjang, tiga senjata laras pendek ditambah parang dan panah.

“Kalau saya pikir jika ini yang digunakan untuk tujuan sesuatu, saya pikir tidak akan mendapat simpatik apa-apa, saya harus ingatkan dimana-mana kekerasan yang digunakan untuk sesuatu tujuan, tentu tidak akan mendapat simpati apa-apa,” ucapnya.

Untuk itu Komnas HAM meminta kepada orang-orang yang bertanggungjawab jika ini pelakunya di bawah struktur OPM, maka harus dihentikan, karena ia memberi jaminan tidak akan memberikan simpatik apapun.

“Apalagi membunuh karyawan sipil yang sudah tidak berdaya, sehingga kita bisa kategorikan sebagai pembantaian yang tidak manusiawi, bisa dikategorikan sebagai tragedi kemanusiaan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura, Osman Marbun memastikan jika seluruh karyawan di PT. Istaka Karya maupun lainnya merupakan warga sipil dan bukan anggota TNI.

“Dalam pekerjaan ini, semua pekerja murni karyawan dari perusahaan tidak ada keterlibatan aparat dari manapun, mereka warga sipil,” kata Osman Marbun.

Ia pun memastikan jika seluruh karyawan yang menjadi korban penembakan baik dari PT. Istaka Karya telah sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Tenaga Kerja, dimana ada jaminan asuransi yang ditanggung oleh Istaka Karya sendiri, sehingga dipastikan korban akan mendapat santunan.

Sebelumnya, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat TPN-PB mengaku sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penembakan beberapa orang yang disebut sebagai karyawan PT. Istaka Karya yang tengah membangun jalan Trans Papua.

“Kami yang bertanggungjawab. Ada kontak senjata. Itu serangan bersenjata, bukan eksekusi seperti yang disampaikan aparat keamanan Indonesia,” ungkap juru bicara TPNPB, Sebby Sambom kepada Jubi melalui sambungan telepon, Rabu (5/12/2018),

yang juga membantah keterangan aparat keamanan Indonesia yang menyebutkan para pekerja dibunuh dengan cara eksekusi.

Hal ini diungkapkan akibat sebelumnya Kapendam Cenderawasih, Kolonel Muhamad Aidi mengatakan karyawan PT Istaka Karya dieksekusi di sebuah tempat bernama Puncak Kabo.

Panglima Daerah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Makodap III Ndugama Egianus Kogeya, lanjut Sebby telah memerintahkan Pemne Kogoya untuk menyerang sejumlah orang di kali Aworak, Kali Yigi dan Pos TNI Distrik Mbua.

Menurutnya, TPNPB sudah cukup lama memantau para pekerja di kali Aworak dan Kali Yigi. (*)

Sejak evakuasi dilakukan, empat warga Nduga dilaporkan tewas, lainnya mengungsi ke hutan

Jayapura, Jubi - Hingga hari ini, Minggu (9/12/2018) dilaporkan sebanyak empat warga sipil di Nduga tewas pasca insiden penembakan karyawan PT. Istaka Karya yang menewaskan 16 orang, 2-3 Desember lalu. Empat warga sipil ini tewas antara tanggal 4-5 Desember saat aparat keamanan melakukan proses evakuasi korban insiden Nduga.

“Dua di Mbua, dua di Yigi, Semuanya keluarga dekat saya. Mereka ditembak aparat keamanan saat aparat lakukan proses evakuasi. Satu di Mbua itu paman saya. Dia majelis gereja, namanya Yulianus Tabuni,” kata Samuel Tabuni, tokoh pemuda Papua kepada Jubi melalui sambungan telepon, Minggu pagi.

Samuel juga menyebutkan bahwa masyarakat di Mbua, Yall dan Yigi saat ini sudah mengungsi ke hutan-hutan. Pengungsian warga ini bisa membuat korban bertambah lagi karena kekurangan makanan atau masalah kesehatan selama mengungsi.

Informasi korban sipil yang tewas di Mbua dan Yigi itu didapatkan Samuel dari keluarganya sendiri hingga dirinya yakin informasi tersebut benar adanya. Jika ada informasi tentang korban sipil lainnya selain empat orang yang diketahuinya, ia mengatakan belum bisa memastikannya.

Samuel menambahkan bahwa keluarganya mengatakan beberapa pendeta dipaksa oleh aparat keamanan sebagai penunjuk jalan dalam operasi pengejaran kelompok bersenjata yang mengklaim diri sebagai pelaku serangan terhadap karyawan PT. Istaka Karya.

Mengenai informasi serangan dari udara yang beredar belakangan ini, Samuel berkata informasi itu belum bisa dikonfirmasi.

“Akses informasi maupun transportasi ke Nduga saat ini memang sulit. Jadi kita belum bisa memverifikasi setiap informasi yang kita dapat,” sambung Samuel.

Kapendam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, dikutip oleh republika.co.id menegaskan, pihaknya tidak menggunakan bom dan tembakan dari pesawat ataupun helikopter dalam mengejar kelompok bersenjata Nduga, Papua. TNI, kata Aidi mengetahui dan paham soal adanya aturan yang berlaku.

"Dalam operasi ini tidak ada penembakan dari pesawat. Hanya pendorongan manusianya, prajurit melaksanakan evakuasi. Tidak ada (menggunakan bom)," ujar Aidi pada Jumat (7/12/2018).

Namun Kepala Distrik Nirkuri, Yosekat K. Kamarigi kepada [VOA Indonesia](http://www.voaindonesia.com) mengatakan tembakan diarahkan ke tempat tinggal warga di hutan-hutan. Data sementara yang dikumpulkannya ada empat orang luka-luka dan dua orang meninggal karena tembakan. Keduanya adalah aparat kampung Wuridlak, dan satunya aparat desa Kujondumu.

“Kami minta kepada warga melalui radio untuk mereka kumpul di satu tempat atau di halaman gereja. Tetapi mereka katanya ketakutan karena polisi dan tentara tembak sembarang. Jadi saya minta untuk simpan foto, video dan gambar-gambar, dan mereka sudah bilang disana ada sebagian sudah ada bukti-butukinya,” tambah Yosekat, dikutip VOA Indonesia. (*)

Gereja : Ratusan keluarga di Nduga mengungsi ke hutan

Jayapura, Jubi – Ratusan warga Mbua, Yall dan Yigi telah mengungsi ke hutan sejak pengejaran kelompok bersenjata yang menyebut diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - yang mengklaim diri sebagai pelaku insiden penembakan para pekerja PT, Istaka Karya, 2 Desember lalu - dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Sebagian besar warga yang mengungsi ini adalah umat Gereja Kemah Injili (Kingmi) Papua.

“Kami mendapatkan laporan dari Yigi dan Yall, sekitar 5 klasis telah mengungsi ke hutan sejak evakuasi korban penembakan dilakukan,” ungkap Pendeta Dr. Benny Giay kepada Jubi, Minggu (9/12/2018).

Pendeta Benny Giay merinci 5 klasis tersebut adalah Klasis Yigi Barat sebanyak 6 jemaat, Klasis Yigi sebanyak 6 jemaat, Klasis Mbua sebanyak 6 jemaat dan Klasis Mbulmuyalma sebanyak 8 jemaat. Satu klasis lainnya, yakni Klasis Mugi belum diketahui pasti berapa jemaat yang mengungsi.

“Masing-masing jemaat itu rata-rata diisi oleh 30-50 kepala keluarga. Jadi jumlah yang diketahui mengungsi dari empat klasis itu ada sekitar 780 kepala keluarga. Jika 1 keluarga dua orang saja, sudah lebih dari 1500 orang yang mengungsi,” jelas Pendeta Benny Giay.

Gereja Kingmi menurut Pendeta Benny Giay adalah denominasi gereja yang dominan di Nduga. Ada sekitar 60.000 umat Kingmi di Nduga.

Ia menambahkan, pada peristiwa penyisiran sebelumnya yang terjadi pada bulan Juni-Juli 2018, 50 keluarga di Kampung Alguru -yang disebut sebagai tempat persembunyian kelompok bersenjata- telah mengungsi ke hutan. Selain itu, ada sekitar 150 orang yang mengungsi ke Timika dan 116 orang keluar dari Nduga menuju Agats, Asmat.

Terkait peristiwa di Nduga yang terjadi dalam waktu delapan hari belakangan ini, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI) menyampaikan keprihatinan yang dalam dan sangat menyesalkan dengan pendekatan kekerasan dalam penyelesaian masalah Papua, baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil, kelompok-kelompok bersenjata maupun aparat Negara.

“Pendekatan kekerasan, dalam bentuk apa pun, menurut hemat kami, tidak akan pernah menyelesaikan masalah, selain hanya akan menciptakan luka-luka baru yang pada gilirannya akan menciptakan lingkaran kekerasan,” tulis Pdt. Dr. Henriette T.H. Lebang, Ketua Umum PGI melalui pesan pastoral PGI terkait peristiwa di Nduga.

PGI menghimbau seluruh pihak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan menyelesaikan ragam persoalan yang ada dengan duduk bersama membicarakannya secara beradab dan bermartabat.

“Hanya dengan demikian kita bisa membebaskan Papua dari pelbagai masalah yang membelitnya,” lanjut Pdt. Dr. Henriette T.H. Lebang. (*)

Tim evakuasi Kabupaten Nduga : Masyarakat masih dalam pengungsian

Wamena, Jubi – Ketua tim evakuasi pemerintah Kabupaten Nduga, Elieser Tabuni mengatakan, hingga saat ini masyarakat lokal di sekitar distrik Mbua, Dal, Mbulmu Yalma, Yal dan Yigi masih mengungsi.

“Masyarakat masih dalam pengungsian. Itu karena masih adanya operasi yang dilakukan aparat keamanan di sejumlah distrik tersebut. Sehingga jika ada yang bilang situasi di Nduga baik-baik atau aman-aman saja itu harus diralat,” katanya kepada Jubi di Wamena, Kamis (27/12/2018).

Ia mengatakan komentar Matius Murib, Direktur PAK HAM Papua yang mengatasnamakan aktivis Hak Asasi Manusia di Papua di sejumlah media online dan juga sosial media yang menyebutkan situasi di Nduga aman-aman saja sangat tidak benar karena yang bersangkutan hanya sampai di distrik Mbua.

Hingga saat ini masyarakat lokal di sana masih dalam kondisi trauma sehingga memilih mengungsi. Ia berharap siapapun itu, jika tidak melihat langsung kondisi masyarakat di sana, jangan memberikan keterangan apapun.

“Tim evakuasi pemda Nduga hingga saat ini masih jalan. Kami pun memberitahukan kepada masyarakat yang mengungsi agar segera kembali ke tempat asal mereka. Dan sementara ini berjalan baik,” katanya.

Elieser Tabuni menambahkan saat tim kabupaten pertama kali mendatangi masyarakat di Mbua, dijumpai tiga masyarakat yang meninggal. Selain itu masyarakat di tiga distrik masih mengungsi ke kabupaten Lanny Jaya, Timika bahkan Jayawijaya.

“Dan masih banyak lagi di hutan, sehingga tanggung jawab kami untuk kumpulkan kembali masyarakat ini,” ujar Tabuni.

Melihat kondisi masyarakat sipil setempat merupakan fokus tim evakuasi ini, selain mencari keberadaan empat korban penembakan yang dinyatakan belum ditemukan hingga kini.

Ia juga mengaku, tim evakuasi ini hingga kini belum bisa tembus ke Distrik Yigi bahkan ke puncak gunung Kabo untuk melihat keadaan disana, sehingga tidak bisa dikatakan aman atau tidak.

Lanjutnya, Jumat (28/12/2018) tim merencanakan akan kembali turun ke Mbua, Dal, Yal dan Yigi untuk melihat lagi kondisi masyarakat setempat.

“Tim akan turun lagi ke lokasi, juga melibatkan pihak keamanan. Pihak TNI menyampaikan untuk masuk ke gunung Kabo, jalan telah dibuka sehingga mudah-mudahan bisa masuk ke sana,” ujarnya.

Sementara tokoh pemuda Nduga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, kondisi di sejumlah distrik ini masih dalam keadaan memprihatinkan, dimana masih ada masyarakat yang mengungsi ke hutan.

“Sejak awal desember hingga sekarang ini masyarakat di sana masih trauma. Sehingga pihak atau lembaga manapun yang akan turun ke sana kalau belum lihat situasi sebenarnya jangan bilang aman-aman saja,” ujar dia.

Ia juga mengaku jika situasi di distrik Yal, Dal dan Yigi hingga kini masih belum aman, karena masih ada operasi yang dilakukan pihak keamanan.

“Untuk itu, kami minta agar aparat keamanan yang ada di sana untuk segera ditarik. Biarkan masyarakat hidup aman dan bisa kembali ke daerah mereka,” katanya. (*)

Pangdam Cenderawasih bantah ada majelis gereja jadi korban TNI/Polri di Nduga

Jayapura, Jubi - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yoshua Sembiring menampik adanya gembala atau warga sipil yang tertembak saat tim gabungan TNI/Polri hendak mengevakuasi korban dari Mbua dan Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Menurutnya, Danrem 172 PVY Kol Inf Binsar Sianipar sudah bertemu dengan masyarakat dan menanyakan hal itu, namun sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat.

"Memang sempat terjadi kontak senjata dengan kelompok bersenjata dan bukan dengan warga sipil," kata Sembiring di Jayapura, Sabtu (15/12/2018).

Dia mengatakan, sampai saat ini masyarakat tidak ada yang melapor tentang adanya korban dikalangan mereka, apalagi gembala sehingga pihaknya berharap agar informasi yang disampaikan disertai dengan bukti-bukti.

"Jangan hanya katanya, karena saat kontak senjata terjadi itu antara kelompok bersenjata dengan tim gabungan TNI/Polri dan bukan dengan warga sipil," ujar Mayjen TNI Sembiring.

Saat ini kawasan seperti Mbua, dan Yigi sudah dikuasai dan sudah didirikan pos serta berangsur-angsur warga masyarakat yang sebelumnya mengungsi kembali ke rumah mereka.

Mantan Kasdam Siliwangi, itu berharap masyarakat percaya bahwa kehadiran anggota TNI/Polri untuk membantu dan memberikan rasa aman dari gangguan kelompok bersenjata.

"Percayalah kehadiran anggota selain mencari dan mengevakuasi karyawan PT. Istaka yang menjadi korban pembunuhan KKB juga mengamankan masyarakat di wilayah tersebut," ujar Pangdam Cenderawasih.

Pernyataan Sembiring bertolak belakang dengan kesaksian Pendeta Giay kepada Jubi yang pernah dimuat oleh tabloidjubi.com.

Minggu (9/12/2018) tabloidjubi.com memberitakan kesaksian dari Pendeta Benny Giay yang menyebutkan bahwa Yulianus Tabuni, warga Mbua, harus kehilangan nyawa saat proses evakuasi korban insiden Nduga, 2-3 Desember lalu. Bahkan ternyata, Yulianus Tabuni merupakan seorang majelis gereja setempat, tepatnya di Distrik Mbua.

"Benar, Yulianus Tabuni adalah majelis gereja di Mbua Dia bukan anggota kelompok bersenjata. Dia yang biasa mengurus kolekte gereja," jelas Pendeta Dr. Benny Giay kepada Jubi.

Yulianus, menurut Pendeta Giay, dilaporkan oleh anggota jemaat gereja Kemah Injili (Kingmi) tewas ditembak aparat keamanan dalam gereja saat aparat keamanan sedang melakukan evakuasi korban insiden Nduga Namun belum diketahui apa sebabnya.

Gereja Kingmi sendiri memiliki sekitar 60 ribu umat di Nduga. Mayoritas penduduk Kabupaten Nduga adalah umat Gereja Kingmi.

Sementara itu, pernyataan Pendeta Giay juga dikuatkan oleh keterangan Tokoh pemuda Papua asal Nduga, Samuel Tabuni. Ia mengkonfirmasi adanya empat warga yang tewas di Nduga saat proses evakuasi berjalan. Dua orang warga di Distrik Mbua dan dua lainnya di Yigi tewas ditembak aparat keamanan.

“Satu di Mbua itu paman saya. Dia majelis gereja, namanya Yulianus Tabuni. Ia ditembak tiga hari setelah peristiwa penembakan karyawan PT, Istaka Karya,” kata Samuel. (*)

Tiga korban tewas di Nduga bukan anggota TPNPB

Jayapura, Jubi - Tim evakuasi Pemerintah Kabupaten Nduga yang terdiri dari Wakil Bupati Nduga, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Nduga, Wakil Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, Anggota MRP, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di Bidang Kemanusiaan – HAM, Mahasiswa dan Tokoh Intelektual Suku Nduga menyatakan tiga korban tewas yang ditemukan di distrik Mbua bukan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

“Nikson Umanggan (18), Mentus Nimiangge (18) dan Mianus Lokbere (35) adalah warga sipil di Mbua. Mereka tidak ada hubungannya dengan kelompok Egianus Kogoya. Ini berdasarkan kesaksian keluarga tiga korban itu,” kata Theo Hese gem, pembela HAM di Pegunungan Tengah Papua kepada Jubi, Sabtu (22/12/2018).

Theo yang bersama tim evakuasi berada di Nduga sejak tanggal 13 -17 Desember menambahkan bahwa jenazah Nikson ditemukan oleh keluarganya pada tanggal 13 Desember di bekas kebun dalam keadaan sudah membusuk. Jenazah Nikson lalu dimakamkan di kampung Sombeloma, Mbua.

Jenazah lainnya yang ditemukan masyarakat adalah Mianus Lokbere. Jenazah Mianus ditemukan pada tanggal 14 Desember didalam rumput-rumput di lokasi bekas kebun masyarakat. Seorang pendeta, lanjut Theo, mengatakan ia melihat korban sedang berada di halaman Gereja Imanuel saat terjadi serangan dari helikopter yang dilakukan oleh pasukan TNI dan Polri.

“Anak itu memang melarikan diri hendak bersembunyi di hutan saat ada tembakan dari heli,” kata Theo mengucapkan apa yang dikatakan pendeta tersebut.

Theo menegaskan bahwa jenazah Nikson maupun Mianus ditemukan oleh warga, bukan oleh pasukan TNI atau Polri yang juga turut serta dalam tim evakuasi pemerintah Kabupaten Nduga ini. Setelah jenazah Mianus ditemukan warga barulah TNI dan Polri datang ke tempat lokasi jenazah ditemukan.

Penegasan Theo ini dibenarkan oleh Ikabus Gwijangge, anggota DPRD Kabupaten Nduga yang ikut juga dalam tim evakuasi.

“Selain itu, kami dan masyarakat yang dapat jenazah Nikson dan Mianus itu tidak melihat tanda-tanda keduanya terlibat dalam TPNPB. Tidak ada senjata atau amunisi di sekitar jenazah keduanya,” kata Ikabus.

Kedua korban ini masih bersekolah di sekolah menengah atas. Nikson duduk di kelas dua SMA sednagkan Mianus di kelas tiga Sekolah Menengah Alkitab.

Pada tanggal 14 Desember tim ini bertemu dengan salah satu korban yang mengalami luka tembak di Distrik Dal. Korban ini bernama Mentus Nimiangge, berusia 21 tahun dan sehari-hari bekerja sebagai aparat kampung. Mentus masih hidup saat bertemu dengan tim evakuasi Kabupaten Nduga ini. Ia tertembak di leher hingga tembus di punggung.

“Mentus bercerita dia sedang ada di salah satu gunung dengan teman-temannya. Kejadiannya tanggal 4 Desember. Saat itu ada helikopter yang lalu lalang di kampungnya. Tidak lama kemudian ada tembakan dari helikopter sehingga mereka berusaha bersembunyi. Namun Mentus terkena tembakan di leher,” ungkap Theo.

Mentus kemudian meninggal pada tanggal 16 Desember saat tim berusaha membawanya ke Wamena untuk mendapatkan pengobatan.

Selain tiga korban tewas ini, ada korban tewas lainnya yang bernama Jarion Kogoya (55). Jarion, lanjut Theo, menurut warga Mbua meninggal karena stroke setelah terkejut mendengar bunyi tembakan di kampungnya.

Pada awal Desember lalu, TPNPB pimpinan Egianus Kogoya menyerang pekerja jalan Trans Papua yang merupakan karyawan PT. Istaka Karya. Serangan yang mengakibatkan 17 orang meninggal ini membuat aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri mengejar kelompok Egianus Kogoya sejak proses evakuasi dan pengejaran berlangsung pada tanggal 3 Desember. Sejak tanggal itu pula masyarakat di Distrik Yal, Yigi, Dal dan Mbua melaporkan terjadinya serangan bersenjata ke tempat tinggal masyarakat setempat menggunakan helikopter hingga menyebabkan beberapa warga sipil tewas. (*)

Kriteria III : Setelah peristiwa berlangsung (upaya perdamaian)

Lembaga dan aktivis HAM minta aparat tidak membabi buta

Jakarta, Jubi - Amnesty International Indonesia (AII) minta aparat keamanan melakukan investigasi cepat, menyeluruh, independen, dan tidak memihak terhadap serangan Nduga, dan memastikan semua yang terlibat dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil tanpa perlu hukuman mati.

Namun Amnesty menegaskan respons tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran HAM lebih lanjut.

"Yang sangat penting dipastikan saat ini adalah respons aparat keamanan terhadap **pembunuhan** tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut," ujar Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid, lewat rilisnya yang diterima Jubi, Kamis (6/12/2019).

Hal itu ditekankan Amnesty khususnya karena aparat keamanan memiliki banyak rekam jejak, terlebih di Papua, yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hak asasi manusia dalam melakukan operasi keamanan.

"Serangan berdarah di Nduga ini juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membungkam kebebasan dan melanggar hak asasi manusia. Pihak berwenang juga harus memastikan bahwa polisi dan militer memberikan keamanan bagi semua orang, tanpa diskriminasi, setelah serangan di Papua." ujar Usman.

Bahkan, sekalipun dalam kondisi lapangan yang kompleks, di mana aparat penegak hukum sering berada di situasi berbahaya ketika melaksanakan tugas mereka di wilayah Papua, Amnesty tetap mengingatkan agar hak hidup, kebebasan, dan keamanan, sesuai standar internasional tentang penggunaan kekuatan tetap diperhatikan.

Amnesty juga mendesak otoritas Indonesia tidak gegabah membuat kebijakan berupa pendekatan militer dalam merespons kejadian di Nduga demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban dari warga sipil.

Senada dengan itu Komnas HAM juga mengingatkan pemerintah agar **pembunuhan** Nduga ditangani secara tepat.

"Sebab jika peristiwa **pembunuhan** tidak ditangani secara tepat dan baik, maka akan mudah berkembang menjadi permasalahan HAM lainnya di kemudian hari," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, seperti dilansir tirto.id, Rabu (5/12/2018).

Selain Komisioner Komnas HAM, Amirudin Al-Rahab, juga minta segala tindakan yang dilakukan pemerintah terkait penanganan kasus itu harus diketahui oleh publik.

"Kami minta proses penegakan polisi harus terbuka agar tidak terjadi spekulasi-spekulasi baru di kemudian hari," kata Amir, di Kantor Komnas HAM.

Pendapat serupa juga diungkapkan Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, Gustaf Kawer. Menurutnya, TNI dan Polri harus

melakukan operasi pencarian pelaku penembakan dengan proporsional dan komprehensif.

"Jangan sampai membabi buta, dengan mengorbankan warga sipil di Papua. Warga sipil harus dilindungi. Jangan ada pertumpahan darah lagi," kata Gustaf, kepada reporter Tirto, Rabu (5/12/2018). (*)

Konflik Nduga, Pemerintah diminta membuka akses dan perlindungan terhadap warga sipil

Jayapura, Jubi - Solidaritas peduli rakyat Nduga dan Mahasiswa Nduga kota studi Jayapura mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka akses terkait kondisi terakhir di wilayah Ndugama yang dikuasai oleh pihak keamanan TNI/Polri.

Eir Gwijangge selaku ketua Tim solidaritas kemanusiaan peduli rakyat sipil Nduga kepada Jubi mengatakan, situasi penembakan yang dilakukan di distrik Digi terhadap karyawan oleh TPNPB pada 2 Desember 2018 hingga saat ini, darurat sipil.

"Tanggapan intruksi yang datang langsung dari Pemerintah Pusat, Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan untuk menumpas kelompok TPNPB hingga saat ini operasi militer masih terus terjadi terhadap warga sipil," katanya, Selasa (11/12/2018) di Abepura, Papua.

Gwijangge berharap Pemda Nduga dan pemerintah pusat duduk kembali dan mempertimbangkan kembali cara-cara yang dilakukan yang dinilai tidak sesuai dengan kemanusiaan, seperti tindakan brutal TNI/Polri yang melakukan operasi militer.

"Kami harap semua pihak untuk melihat kembali situasi Nduga terutama pemerintah pusat untuk menarik TNI/Polri yang melakukan operasi di sana," katanya.

Pemerintah Pusat dan Pemda Nduga harus melihat situasi dengan melakukan dialog sehingga ada solusi lain terkait masalah di Nduga karena korban sipil hingga saat ini terus bertambah 12 orang meninggal dunia akibat operasi militer yang dilakukan pihak TNI/Polri.

"Mereka ini ditembak melalui serangan udara di enam distrik. Pemerintah Indonesia sudah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil yang tidak tau apa-apa, karena serangan yang dilakukan tersebut tidak mengarah kepada kelompok TPNPB

Egianus Kogoya, namun mengarah ke warga sipil yang tidak berdosa," katanya.

Akibat ulah ini kata dia, masyarakat Nduga harus mengungsi ke hutan-hutan hampir 150 ribu orang. Sehingga pihaknya dengan tegas mengecam tindakan anarkis yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia melalui TNI/Polri saat ini.

"Kami juga berharap ada kesepakatan Pemda Nduga dan pemerintah pusat agar membuka akses ke enam distrik supaya kami bisa bertemu dengan mereka. Di sana ada orang tua kami, adik-adik kami jadi kami tidak bisa tidur," katanya.

Lanjut dikatakannya, Pemerintah pusat diminta mencabut semua operasi militer di kabupaten Nduga.

“Kalau mau berhadapan sama Egianus Kogoya dan pasukannya ambil medan tempur dan selesaikan bukan membombardir sembarang di tengah penduduk sipil,” kesalnya.

Sementara itu, Remes Ubruangge ketua DPC Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga kota studi Jayapura dengan tegas menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan pimpinan TNI/Polri yang masih melakukan operasi militer di tiga distrik induk dan sembilan distrik pemekaran kabupaten Nduga, untuk menghentikan segala aktivitas yang hanya membuat trauma masyarakat sipil.

"Pemprov Papua, DPR Papua, MRP, Komnas HAM Papua dan pemerintah kabupaten Nduga segera ambil langkah untuk segera membuka akses ke distrik yang sedang terjadi serangan demi penyelamatan warga sipil yang terjebak di wilayah pertempuran," tegasnya.

Ia menambahkan sampai saat ini akses untuk mengetahui keadaan mereka sangat sulit sekali dan tertutup.

“Kami tidak bisa memastikan mereka tidur di mana, bagaimana kondisi orang tua kami, mereka makan apa? Karena dari pantauan kami belum ada satupun bantuan logistik berupa makanan yang di berikan kepada warga sipil,” ujarnya.

Tak hanya itu, perwakilan mahasiswi Nduga juga angkat bicara. Feronika Nirigi berharap pemerintah Nduga dan pemerintah pusat harus turun tangan untuk melihat langsung kondisi lapangan serta memastikan tidak ada korban warga sipil yang terjadi lagi, yang bisa menambah trauma masyarakat Nduga dengan sikap arogan pihak keamanan.

"Kami mohon kumpulkan semua warga sipil pada satu tempat jangan menambah trauma kepada orang tua dan adik-adik kami disana yang tidak tau apa-apa," harapnya. (*)

Gubernur dan DPR Papua sepakat tarik aparat keamanan dari Nduga

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua dan tujuh fraksi yang ada di DPR Papua sepakat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Panglima TNI, Kapolri dan para pemangku kepentingan di Jakarta menarik aparat keamanan (Polri dan TNI) dari Kabupaten Nduga.

Gubernur Papua, Lukas Enembe usai paripurna ke-V DPR Papua dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap materi Raperda non-APBD, mengatakan sikap pihaknya bersama DPR Papua, tokoh masyarakat, tokoh gereja sudah jelas. Meminta Presiden Jokowi menarik pasukan dari Kabupaten Nduga.

"Ini adalah momen Natal, tidak boleh lagi ada TNI dan Polri di sana. Kami juga sepakat membentuk tim independen sehingga tidak banyak pelanggaran terjadi terhadap masyarakat sipil," kata Lukas Enembe, Kamis (20/12/2018) malam.

Menurutnya, tim independen yang akan dibentuk terdiri dari Pemprov Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, Komnas HAM dan pihak terkait lainnya.

"Pasukan harus ditarik. Kita berbelasungkawa apa yang terjadi pertama dan saat ini. Sudah cukup, jangan lagi ada korban jiwa di sana. Masyarakat belum diungsikan, mereka sudah masuk (kejar pelaku). Makanya kami minta tarik semua dulu," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Papua bersama pihak terkait juga akan melakukan langkah lain, salah satunya bertemu Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut.

"Langkah-langkah selanjutnya ada. Kami akan bertemu Presiden, dan pihak terkait lainnya. Kami minta TNI Polri, dan Panglima agar ada waktu bagi kami tim membawa bahan makanan untuk masyarakat di lokasi," ujarnya.

Nantinya lanjut Enembe, hasil kunjungan tim nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat. Namun bukan hanya masalah Nduga, pihaknya berkomitmen agar persoalan yang terjadi di Papua akan dilaporkan semua ke pemerintah pusat.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menyatakan hal yang sama. Pihaknya meminta presiden menarik pasukan dari Nduga agar masyarakat di wilayah itu dapat merayakan Natal bersama keluarganya dengan damai dan sukacita.

"Biarkan kami merayakan Natal dengan damai dan sukacita bersama keluarga kami," kata Yunus Wonda

Ia mengatakan, situasi di Nduga kini merupakan rentetan dari terbunuhnya belasan warga sipil awal, pekerja jalan trans Papua, 2 Desember 2018 lalu. Namun untuk saat ini berikan kesempatan kepada masyarakat merayakan Natal dengan damai dan sukacita, karena mereka bukan pelaku dan juga bagian dari negara ini.

"Kami harap semua aparat keamanan yang ada di tanah ini memberikan kedamaian dan sukacita kepada orang Papua. Setelah Natal dan Tahun Baru, silahkan melakukan penegakan hukum karena itu ranah aparat keamanan. Tapi jangan ada noda pada masa Natal kini dan Tahun Baru. Kami harap semua berhenti bertikai, baik aparat keamanan dengan TPN/OPM," katanya.

Sebagai bentuk prihatin lanjut Wonda, gubernur Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan para *stake holder* lainnya di Papua dalam rapat tertutup, Rabu (19/12/2018) malam di Gedung Negara, sepakat tidak menggelar *open house* saat hari raya Natal, sebagai bentuk sikap berduka terhadap kondisi rakyat di Papua kini.

"Ini duka kedua setelah kasus Paniai. Kami tetap mengutuk tindakan itu (pembunuhan terhadap pekerja jalan trans Papua). Silahkan melakukan penegakan hukum terhadap oknum pelaku. Tapi mestinya masyarakat diungsikan dulu dari lokasi yang disasar, agar masyarakat sipil tidak ikut menjadi korban," ujarnya.

Sementara dalam paripurna ke-V DPR Papua dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap materi Raperda non-APBD, tujuh fraksi yang ada di DPR Papua mendukung permintaan gubernur menarik pasukan dari Nduga dan pembentukan tim independen.

Nioluen Kotouki yang melaporkan pandangan akhir Fraksi Keadilan Nasional menyatakan rasa duka mendalam pihaknya terhadap orang asli Papua di Nduga yang korban akibat penyisiran aparat TNI (Polri) pascainsiden penembakan awal Desember 2018.

"Fraksi Keadilan Nasional Papua meminta pemerintah pusat, TNI (Polri) menghentikan operasi militer di Nduiga sehingga warga asli Papua terutama yang beragama Kristen bisa menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru dalam suasana damai," ujar Nioluen Kotouki.

Sementara Ketua Fraksi Hanura, Nikius Bugiangge dalam laporan pandangan fraksinya mengatakan, meminta gubernur, Ketua DPR Papua, Ketua MRP, beserta pimpinan fraksi-fraksi dewan dan perwakilan masyarakat di antaranya tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta aktivis LSM dan Komnas HAM segera menghadap Presiden Jokowi. Meminta atas nama kemanusiaan dan

penghormatan terhadap umat Kristiani di Tanah Papua yang sedang menyambut Natal agar menghentikan operasi militer yang dilakukan TNI (Polri), dan menarik semua pasukan organik maupun non organik dari Nduga.

"Kami juga meminta dibentuknya tim investigasi yang melibatkan Komnas HAM untuk memperoleh hasil utuh tentang realitas yang terjadi di Nduga," ujar Nikius Bugiangge.

Katanya, apa pun hasilnya kelak, entah melibatkan kelompok sipil bersenjata, militer, diharapkan adanya penegakan hukum demi keberadaan umat Tuhan di Tanah Papua.
(*)

Lukas Enembe: Amankan rakyat dan tangkap kelompok bersenjata di Nduga

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta TNI/Polri untuk segera menangkap kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya, yang beroperasi di Kabupaten Nduga. Hanya saja dirinya tetap meminta aparat gabungan dalam melakukan penangkapan jangan mengganggu masyarakat setempat.

"Peristiwa Nduga rakyat kita yang jadi korban, jadi aparat tetap harus amankan rakyat, dan kejar pelaku yang sudah lari ke hutan harus ditangkap," kata Enembe kepada wartawan usai rapat bersama Forkompimda, di Jayapura, Jumat (28/12/2018).

Terkait pertemuan bersama Forkompimda, kata Enembe, hal ini untuk menanggapi peristiwa penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata terhadap pekerja PT. Istaka Karya di Nduga 2 Desember 2018 lalu.

"Intinya, Forkompimda harus membicarakan dalam diskusi seperti ini. Dalam artian, tidak akan bicara diluar dari kesepakatan. Sehingga jika ada kasus yang menonjol dan menyangkut kepentingan nasional, harus di bicarakan lebih dulu, sehingga ketika ingin disampaikan ke publik sesuai dengan kesepakatan bersama," ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, Gubernur Enembe menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI/Polri yang sudah melaksanakan tugas untuk mengejar kelompok bersenjata di distrik Mbua, Yigi dan Yall.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada TNI/Polri yang sudah melaksanakan tugas di sana. Kami harap, para pelaku penembakan harus dikejar sampai dapat," kata Enembe dengan tegas.

Enembe menambahkan, seluruh pembangunan infrastruktur di Papua, termasuk Nduga yang telah dicanangkan Presiden Jokowi harus tetap dilanjutkan sampai tuntas.

"Pak Jokowi punya komitmen untuk membangun rakyat Papua, sehingga harus di dukung dengan baik," ujarnya.

Sementara, hal ini pun disampaikan Kapolda Papua, Irjen Pol Martuani Sormin. Selepas pertemuan dengan Gubernur Enembe, Sormin mengatakan, ia telah memaparkan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe terkait apa yang terjadi di Kabupaten Nduga.

"Kami pastikan pekerja itu adalah warga sipil. Kemudian muncul isu tiga atau empat orang meninggal akibat bom. Pada 12 Desember 2018, saya perintakan Kasat Serse dan Kasat Intel mengecek apakah benar ada bom, ada yang meninggal," ucapnya.

Katanya, dari fakta dan keterangan saksi, tiga orang ditemukan meninggal dunia. Dua orang telah dimakamkan dan satu dibakar. Polda menganalisis, ketiganya diduga bagian dari penyerangan Pos TNI, 3 Desember 2018 di Nduga, yang menyebabkan satu TNI meninggal dan satu lainnya terluka. (*)